ISSN 2460-1683

Masyarakat ASEAN

Edisi 8 / JUNI 2015

AMAN DAN STABIL, KENISCAYAAN BAGI ASEAN

"ASEAN adalah kita"

MEDIA PUBLIKASI DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA ASEAN
KEMENTERIAN LUAR NEGERI RI

DAFTAR ISI

Perspektif
Memimpin Pembangunan Politik dan Keamanan di ASEAN **4**

Laporan Utama
Perdagangan Orang, Ancaman Nyata Keamanan ASEAN **12**
Sinergi Kemlu dan Peneliti Dalam Upaya Kontra Terorisme **16**

Laporan Khusus
Peta Jalan Masa Depan ASEAN **21**
Pemimpin Asean Bawa ASEAN Merakyat **22**

Reportase
Komitmen ASEAN Lindungi Perempuan dan Anak **27**
Indonesia Australia Luncurkan EAS Toolkit **30**

Wawancara
Kolonel Laut (P) Aries Cahyono Masyarakat Tarakan Sudah Cukup Dewasa **32**

Wisata
Wisma Negara Tiongkok Megah Penuh Sejarah **40**

Pojok Sosialisasi
Sumenep Siap Sambut MEA **46**

Serba serbi
Dua Karang MEA **50**
Peluang dan Tantangan RCEP bagi ASEAN **52**

Apa Kata Mereka 57

LAPORAN UTAMA 6

ISU LAUT TIONGKOK SELATAN

MISI STRATEGIS SANG 'HONEST BROKER'

Ketegangan akibat sengketa tumpang tindih perbatasan wilayah di Laut Tiongkok Selatas kembali meningkat. Penyebabnya, beberapa negara yang terlibat sengketa melakukan reklamasi atau pembangunan di gugus karang dan pulau yang sebenar–nya masih disengketakan kepemilikannya. Terkait dengan sengketa di LTS, Indonesia senantiasa berperan untuk meredam konflik serta mengupayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Di sisi lain, Indonesia juga berpandangan bahwa cara ASEAN menangani isu LTS merupakan ujian terhadap sentralitas ASEAN.

AP

LAPORAN UTAMA 9

ROHINGYA, ANTARA SOLIDARITAS ASEAN DAN KEMANUSIAAN

Indonesia, Malaysia dan Thailand telah memainkan peran cerdik dalam menjembatani antara ketidakmampuan untuk mencampuri urusan dalam negeri Myanmar dengan kepedulian akan kondisi darurat kemanusiaan di tingkat regional. Meski tak diakui sebagai warga negaranya oleh Myanmar, Etnis Rohingya masih bisa dikatakan sebagai warga ASEAN.

ACEHTERKINI.COM

Masyarakat
ASEAN

LAPORAN UTAMA 14

INDONESIA, TERDEPAN DALAM KONTRATERORISME DI ASEAN

Karena hal prinsip dan pengalaman buruk akibat tindak terorisme, bagi Indonesia terorisme adalah masalah yang harus diselesaikan sampai ke akarnya. Indonesia bersama ASEAN berupaya untuk menjadi yang terdepan dalam penanggulangan terorisme.

ANTARA

LAPORAN KHUSUS 18

KTT KE-26 ASEAN

PERKUAT SENTRALITAS ASEAN

ASEAN harus memperkuat sentralitas dan kapasitas institusionalnya seiring dengan meningkatnya ketergantungan ekonomi dan perkembangan dinamika keamanan di kawasan.

SCMP.COM

WAWANCARA 34

PJ GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TRIYONO BUDI SASONGKO

KALTARA HARUS PERCAYA DIRI

BERITABORNEO.CO.ID

TTRAVEL.MOBI

WISATA 38

MENIKMATI INDAHNYA YANGON

POJOK SOSIALISASI 44

GANDENG SETNAS ASEAN

BP BATAM SIAP SAMBUT MEA

SERBA SERBI 54

SINGAPORE AIRLINES GARAP PASAR DOMESTIK INDONESIA?

Bagi Anda yang ingin mengirim tulisan atau menyampaikan tanggapan, informasi, kritik dan saran, silahkan kirim melalui e-mail: buletinkomunitasasean@kemlu.go.id

Penanggung Jawab:
Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN
I Gusti Agung Wesaka Puja

Penasehat
Sekretaris Direktorat Jenderal
Kerja Sama ASEAN
Iwan Suyudhie Amri

Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi
Andi Dirgahayu Yudyachandra

Dewan Redaksi
Kusnaredi Takarijanto
Braviono Arief Adilaksono
Didik Trimardjono
Annie Yuliyanti

Redaktur Pelaksana
Andi Dirgahayu Yudyachandra

Staf Redaksi
Ahimsa Sukartono, Endang Susilowati, Susilo, Sylvia Masri, Rizky Anugerah Putra, Mohamad Rizali Noor, I Made Diangga Adika Karang, Wiweka Sukma Wardhani, Nur Rochma Amaliah, Rina F. Wahyuningsih, Fajar Arianto, Rahma Juwita

Pemelihara Situs Web
Puri Wulandari
Mizana Khusnu Perdani

Administrasi
Avi Dewani Sari Harahap, Didi Suparyadi, Priya Novian, TB. M. Ramadhan
Indyah Kusumawati

Distribusi
Mulyanto, Kasirun
Tuwuh Ismail

Alamat Redaksi:
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN
Kementerian Luar Negeri, Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta Pusat,
Telp. 021-3509050/021-3509059,
Fax. 021-3509050

MEMIMPIN PEMBANGUNAN POLITIK DAN KEAMANAN DI ASEAN

M. Chandra W. Yudha
Direktur Politik-Keamanan,
Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN

Pembangunan pilar politik dan keamanan ASEAN mungkin bagi banyak orang tidak sepenting pembangunan pilar ekonomi ASEAN. Namun demikian bukan tanpa alasan Indonesia terus bekerja keras, menjadi pelopor dan pemimpin, untuk pemajuan nilai, norma, dan mekanisme politik dan keamanan di ASEAN.

Pentingnya Kerja Sama Politik dan Keamanan di ASEAN

Pembentukan ASEAN didasari oleh motif politik dan keamanan. Di tengah perang dingin dan rendahnya kepercayaan antar negara di kawasan Asia Tenggara, dibutuhkan suatu terobosan kerja sama kawasan yang saling menguntungkan. Fokus pada bidang kerja sama ekonomi dan kebudayaan diantara lima negara pendiri menjadi pilihan awal untuk membangun kepercayaan di antara negara anggota ASEAN tersebut.

Namun, kesadaran pentingnya stabilitas dan perdamaian dikawasan tetap menjadi penggarak utama yang terbukti dengan disahkannya *Treaty Amity and Cooperation in the South East Asia Region* pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN Pertama, tahun 1976 di Bali. Traktat ini menjadi pilar awal kerja sama politik ASEAN yang menjunjung prinsip penyelesaian sengketa secara damai, non-intervensi dan peningkatan kerja sama.

Setidaknya ada beberapa alasan penting kenapa Indonesia terus mendorong pembangunan pilar politik dan keamanan ASEAN.

Pertama, Kerja Sama politik dan keamanan merupakan pelaksanaan mandat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berperan aktif untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tantangan keamanan di kawasan Asia Tenggara terus berkembang, baik sengketa tradisional antar negara maupun tantangan non-tradisional. Secara tradisional, penyelesaian sengketa batas wilayah atau delimitasi maritim antar negara di ASEAN masih belum usai. Konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di sekitar perbatasan Candi Preah Vihear menjadi contoh nyata. Di laut, sengketa atas fitur dan delimitasi maritim, khususnya antara negara anggota ASEAN dengan RRT, menunjukkan eskalasi yang mengkhawatirkan. Laut Tiongkok Selatan adalah jalur navigasi penting bagi pelayaran dunia. Konflik terbuka di LTS akan membawa ekses negatif, baik secara ekonomi maupun secara geo-politik bagi Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah tersebut.

Kedua, pembangunan politik dan keamanan menjadi fondasi awal pembangunan ekonomi Indonesia dan negara anggota ASEAN. Perdamaian dan keamanan selalu menjadi prasyarat pembangunan ekonomi, baik ditingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam konteks ASEAN, pembangunan nilai-nilai perdamaian dan keamanan sejak awal berdirinya ASEAN telah menciptakan ruang bagi pembangunan ekonomi di ASEAN.

Upaya membangun perdamaian dan keamanan di kawasan bukanlah pekerjaan mudah karena membutuhkan peningkatan kerja sama dengan negara sekitar, seperti contoh kerja sama politik ASEAN-RRT dalam menjaga stabilitas di LTS yang merupakan jalur perdagangan penting dunia.

Lebih jauh bidang kerja sama penanggulanan kejahatan lintas negara juga dapat mengurangi risiko beban biaya ekonomi yang disebabkan, antara lain, tindakan korupsi, pencucian uang, perdagangan manusia, dan terorisme. Contoh lain yang juga patut diangkat adalah kerja sama keimigrasian yang berhasil meningkatkan kemudahan bergerak bagi masyarakat dari satu negara ke negara lain di ASEAN dan membantu peningkatan turisme di ASEAN.

Ketiga, pembangunan politik dan keamanan menjaga agar pembangunan ASEAN ditujukan seluruhnya untuk kepentingan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu negara, atau kawasan, tidak serta merta paralel dengan pemerataan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan hak-hak masyarakat. Bahkan, pertumbuhan ekonomi terkadang mempunyai mempunyai ekses negatif terhadap perlindungan hak-hak individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, kerja sama di bidang hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap migran dan buruh migran menjamin kehadiran ASEAN bagi masyarakat.

Lebih jauh, kerja sama di bidang hukum, terutama dalam

mengupayakan peningkatan integrasi ASEAN berdasarkan kerangka hukum, akan berperan penting dalam menjamin norma-norma yang telah disepakati dapat diimplementasikan secara efektif.

Peran Indonesia bagi Pembangunan Pilar Politik dan Keamanan ASEAN

Indonesia selalu menjadi penggerak pembangunan politik dan keamanan di ASEAN. Inisatif untuk pembangunan pilar politik dan keamanan berawal dari kesadaran Indonesia untuk menyebarkan semangat demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia ke Asia Tenggara. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, peran penting Indonesia dalam memimpin pembangunan politik dan keamanan ASEAN merupakan kewajiban. Hal ini juga didukung fakta bahwa perkembangan politik dan demokrasi negara anggota ASEAN lainnya, masih jauh tertinggal dari Indonesia.

Oleh sebab itu, mengingat pentingnya pembangunan politik dan keamanan ASEAN, peran aktif Indonesia sebagai pemimpin perkembangan pilar politik dan keamanan di ASEAN sangat diperlukan. Dalam hal ini, Indonesia didukung oleh modal yang kuat. Selain sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia, Indonesia juga mempunyai modal dalam penyelesaian konflik internal, bilateral, maupun sebagai penengah dalam berbagai konflik di kawasan. Proses penyelesaian konflik di Kamboja melalui *Jakarta Informal Meeting* tahun 1988 dan *Informal ASEAN Foreign Ministers Meeting* di Jakarta tahun 2011 untuk meredakan ketegangan di perbatasan Thailand-Kamboja adalah bukti kepercayaan negara-negara terhadap Indonesia. Selain itu, *Shuttle Diplomacy* yang dilakukan Indonesia untuk membantu sengketa Thailand-Kamboja, menjembatani kegagalan *Joint Communique ASEAN Foreign Ministers' Meeting* tahun 2012, dan penanggulangan iregular migran etnis Rohingnya tahun 2015 menjadi bukti lain kepemimpinan Indonesia.

Modal lain Indonesia adalah keaktifan Indonesia dalam berbagai forum kerja sama regional maupun internasional. Indonesia selalu berpandangan bahwa ekstrapolasi nilai-nilai ASEAN dalam regional arsitektur yang lebih luas akan membantu peningkatan kerja sama politik dan keamanan di ASEAN. Kesadaran bahwa partisipasi aktif negara-negara besar adalah keharusan dalam proses penciptaan perdamaian dan stabilitas di kawasan, membuat Indonesia menciptakan ASEAN Regional Forum dan mendorong peningkatan kerja sama dalam *East Asia Summit*.

Menjadi pemimpin di ASEAN tentu bukan sesuatu yang diterima begitu saja. Modal Indonesia tersebut harus senantiasa digunakan dan ditingkatkan untuk menjaga peran sentral Indonesia dalam pembangunan politik dan keamanan di ASEAN, terutama dalam menjelang Masyarakat ASEAN 2015.

Masyarakat ASEAN 2015 mengisyaratkan akan kebutuhan integrasi yang lebih besar di masa depan. Oleh sebab itu, kesiapan Indonesia dalam memimpin proses pembentukan nilai, norma dan mekanisme di pilar politik dan keamanan ASEAN akan selalu dituntut, terutama ketika negara lain di ASEAN tidak mempunyai kekuatan dan modal penting seperti Indonesia. •

BORNEOASEANREPORTS.COM

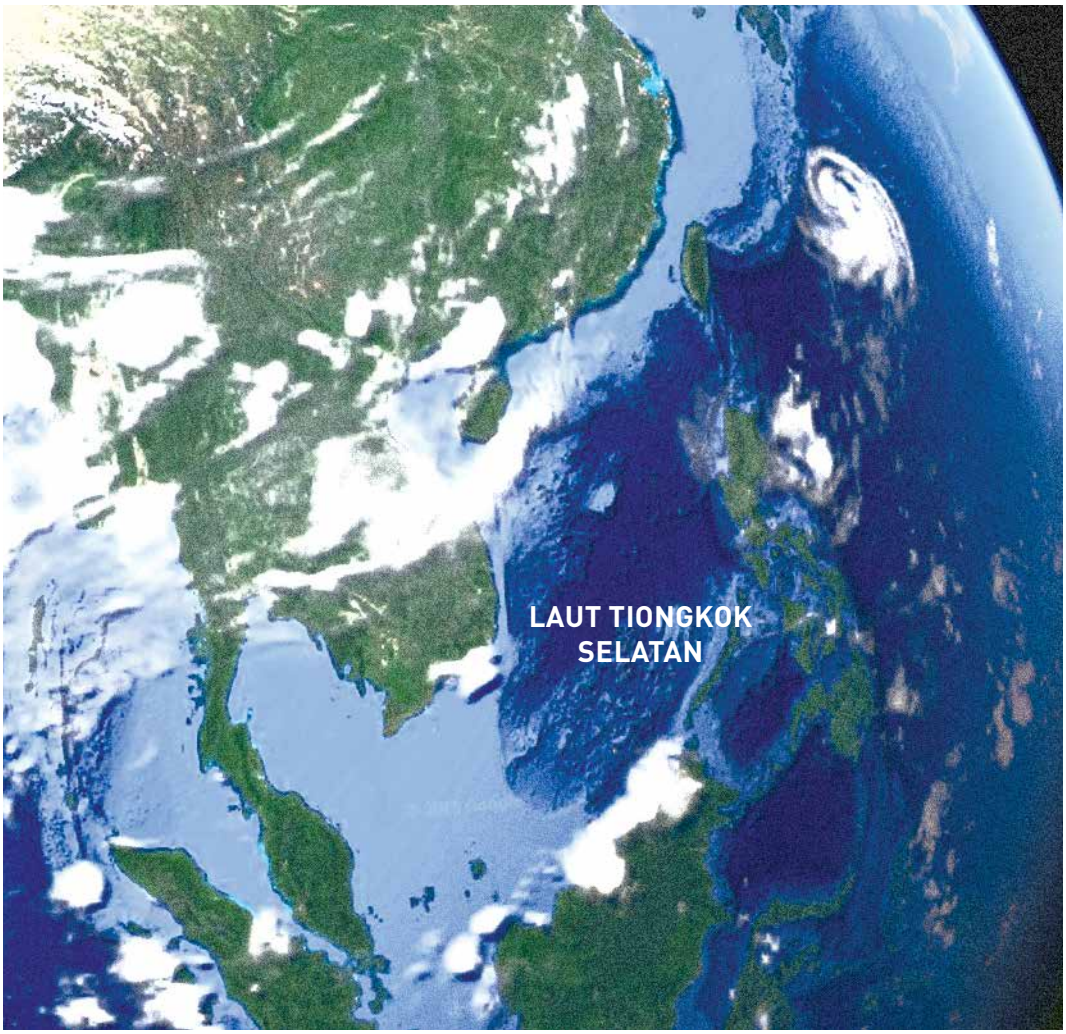

Laut Tiongkok Selatan, kawasan dengan potensi konflik yang tinggi karena adanya tumpang tindih klaim teritorial dari beberapa negara, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam.

ISU LAUT TIONGKOK SELATAN
MISI STRATEGIS SANG 'HONEST BROKER'

Adanya kegiatan reklamasi di wilayah yang disengketakan mempersulit upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di Laut Tiongkok Selatan

Sengketa tumpang tindih klaim atas fitur di Laut Tiongkok Selatan (LTS) telah memasuki tahapan baru dengan semakin intensifnya reklamasi di beberapa fitur di LTS. Di saat yang bersamaan, proses gugatan arbitrase oleh Filipina, yang utamanya terkait penafsiran *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) atas klaim *nine-dashed line* terus berjalan.

Pasang-surut Stabilitas LTS

Kawasan Laut Tiongkok Selatan memang merupakan kawasan yang potensi konfliknya cukup tinggi mengingat adanya klaim teritorial yang tumpang tindih melibatkan negara anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Vietnam) dan negara/entitas di luar ASEAN (RRT dan Taiwan). Upaya menghindari konflik serta menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan merupakan hal yang harus

FORBES.COM

Beberapa kawasan yang diperebutkan di Laut Tiongkok Selatan, yaitu Kepulauan Paracel, Kepulauan Spratly, Scarborough Shoal.

terus menerus diusahakan melalui penyusunan berbagai instrumen dan kerja sama konkrit di kawasan.

Sebenarnya, ASEAN-RRT telah memiliki *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* (DOC) yang disahkan pada tahun 2002. DOC merupakan instrumen penting yang bertujuan untuk memajukan perdamaian, stabilitas dan saling percaya (*mutual trust*) serta menjamin penyelesaian sengketa secara damai di LTS. Dalam rangka implementasi DOC secara penuh dan efektif, ASEAN-RRT telah menyepakati *Guidelines on the Implementation of DOC* yang disahkan pada tahun 2011. *Guidelines* pada dasarnya adalah sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan/proyek kerja sama sebagaimana tercantum di dalam DOC. DOC juga memandatkan agar ASEAN-RRT dapat menyepakati suatu *Code of Conduct in the South China Sea* (COC).

Dalam banyak pertemuan ASEAN maupun dalam konteks ASEAN-RRT dan *ASEAN-led Mechanisms* lainnya, Filipina telah berkali-kali menyampaikan protes atas upaya RRT melakukan reklamasi terhadap fitur-fitur tersebut. Keberatan Filipina atas reklamasi tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 5 DOC yang menekankan perlunya ASEAN-RRT untuk melakukan *self-restraint* untuk menhindari esklasi sengketa menjadi konflik.

Secara umum, Filipina beranggapan bahwa upaya reklamasi yang dilakukan RRT di fitur-fitur tersebut akan mengubah *status quo* di kawasan. Filipina juga beranggapan bahwa perubahan dari fitur-fitur tersebut telah merusak lingkungan dan ekosistem laut di sekitarnya. Selain itu, beberapa ahli menyatakan bahwa konsekuensi yang muncul akibat dari adanya reklamasi adalah kesulitan untuk mengidentifikasi fakta-fakta terkait dengan fitur-fitur yang disampaikan Filipina kepada arbitrase. Selain itu, ke depan, penentuan delimitasi wilayah laut dari fitur-fitur tersebut juga akan menjadi lebih sulit.

Di sisi lain, RRT berpandangan bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh pihaknya mempunyai alasan hak yang sah. RRT berpandangan bahwa kepemilikan RRT atas fitur-fitur tersebut tidak dapat dibantah, sehingga kegiatan apapun yang dilakukan di wilayah teritorialnya, merupakan kegiatan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum internasional dan DOC. Selain itu, pada pembahasan di *13th Joint Working Group on the Implementation DOC*, RRT menyampaikan bahwa kegiatan dimaksud tidak mengganggu negara lain dan tuduhan yang menganggap reklamasi mengancam stabilitas di kawasan tidak berdasar karena RRT membutuhkan kestabilan dan keamanan di wilayah LTS.

RRT juga menyampaikan bahwa konstruksi yang dilakukan hanya ditujukan untuk meningkatkan *living condition* dari personil RRT yang ditempatkan di pulau tersebut dan meningkatkan kapasitas RRT dalam memenuhi kewajiban

WALLSTREET JOURNAL

Kepulauan Spratly, salah satu gugus pulau dan karang yang disengketakan oleh beberapa negara di ASEAN yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei Darussalam, serta negara non ASEAN yakni RRT dan Taiwan.

internasional dalam hal *search and rescue* dan penanganan bencana. Konstruksi yang dilakukan RRT tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan ekosistem laut karena telah memperhitungkan kesinambungan dan kelestarian lingkungan dan menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Peran Berat Indonesia sebagai *Honest Broker*

Persoalan di LTS yang merupakan klaim territorial yang melibatkan RRT, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan, hanya dapat diselesaikan melalui perundingan langsung antara *claimant states*. Upaya ASEAN dalam kaitannya dengan isu di LTS utamanya untuk mendorong perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut yang diharapkan dapat menghasilkan kondisi kondusif untuk upaya penyelesaian damai terkait sengketa territorial dimaksud.

Mengemban peran sebagai *the honest broker*, Indonesia memiliki kewajiban untuk terus menjaga netralitasnya terkait sengketa kepemilikan dari fitur-fitur di LTS dan mendorong seluruh claimant states untuk dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara-cara damai dan tidak menggunakan kekerasan.

Indonesia selalu menjembatani perbedaan sejak awal tahun 1990an melalui proses *Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea* hingga penyelesaian DOC di tahun 2002. Indonesia juga tetap berupaya mempersatukan ASEAN dan kawasan.Selain itu, dalam konteks ASEAN-RRT, Indonesia selalu berupaya menciptakan ide-ide baru untuk mencegah jalan buntu dalam menciptakan situasi kondusif di LTS.

Indonesia juga berpandangan bahwa cara ASEAN menangani isu LTS merupakan ujian terhadap sentralitas ASEAN. Walaupun tidak seluruh negara anggota ASEAN merupakan *claimant states*, ASEAN perlu mempertahankan *unity* dan menunjukkan simpati kepada negara anggota lain yang menghadapi masalah.

Terlepas dari beratnya peran *honest broker*, tugas utama yang dapat dijalankan oleh Indonesia adalah meminta semua pihak untuk menjalankan ketentuan-ketentuan pada DOC, termasuk pasal 5 mengenai seruan untuk menahan diri (*self restraint*) dari kegiatan yang dapat memperumit dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di LTS. termasuk menahan diri dari tindakan menghuni pulau yang saat ini tidak berpenghuni, karang, beting, gundukan, dan fitur lainnya (*refraining from action of inhabiting on the presently uninhabited islands, reefs, shoals, cays, and other features*). Tidak dapat dipungkiri, kegiatan reklamasi di wilayah yang disengketakan memang akan membuat upaya menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan semakin sulit. •

DIT. POLITIK-KEAMANAN ASEAN

ROHINGYA
ANTARA SOLIDARITAS ASEAN DAN KEMANUSIAAN

Sekitar pertengahan Mei lalu, warga kabupaten Aceh Utara dikejutkan oleh terdamparnya kapal-kapal yang membawa ribuan orang etnis Rohingya dan Bangladesh. Para pengungsi tersebut datang secara bergelombang dan dalam kondisi mengenaskan, akibat kekurangan makanan dan minuman selama berminggu-minggu di laut lepas. Para pengungsi yang pasrah tersebut diselamatkan oleh beberapa nelayan yang melihat mereka tengah terombang-ambing, lalu membawanya ke daratan. Mereka lalu dibawa "berkeliling" Aceh, akibat bantuan yang masih seadanya dan belum adanya koordinasi, mulai dari stadion olahraga di Lhoksukon hingga ke Lhokseumawe.

NEWYORK TIMES

Pengungsi asal Rohingya Myanmar saat masih terkatung di atas perahu.

Persebaran Rohingya

Terdamparnya warga etnis Rohingya di Aceh Utara ini menambah jumlah pengungsi etnis tersebut di tanah air. Menurut data *United Nations High Commission on Refugees* (UNHCR), per Februari 2015 telah ada sebanyak 792 pencari suaka dan pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar. Keberadaan etnis Rohingya asal Myanmar saat ini banyak ditampung di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) seperti rudenim Belawan, Tanjung Pinang, dan Menado. Selain itu, beberapa pencari suaka dan pengungsi juga berada di luar Rudenim, namun difasilitasi oleh *International Organization for Migration* (IOM) di beberapa kota seperti Bogor, Jakarta, Makassar, dan Medan.

Indonesia dapat dikatakan masih belum seberapa. Di Bangladesh, diperkirakan terdapat 400.000 pencari suaka etnis Rohingya. Namun yang terdata oleh UNHCR hingga Juli 2014 terdapat 232.597 pencari suaka dan pengungsi. Ini karena, wilayah yang didiami oleh etnis Rohingya lebih dekat dengan perbatasan Bangladesh. Di India, sekitar 9.000 etnis Rohingya terdaftar di Delhi dan ribuan lainnya tidak terdaftar, tersebar di berbagai kota seperti Jammu dan Hyderabad. Meski pengungsi Rohingya tidak memiliki status pengungsi secara penuh, namun Pemerintah India mengizinkan mereka tinggal untuk sementara di penampungan. UNHCR Thailand juga mencatat sebanyak 132.000 pengungsi etnis Rohingya asal Myanmar yang sebagian besar berasal dari wilayah Kayin dan Kayah.

Malaysia sebagai negara mayoritas Muslim merupakan salah satu negara tujuan dari para pencari suaka asal Myanmar. Malaysia memberikan akses pekerjaan kepada para pencari suaka sehingga jumlahnya meningkat drastis. Hingga September 2014, UNHCR mencatat sebanyak 137.788 pengungsi asal Myanmar tersebar di Malaysia. UNHCR telah bekerja

sama dengan pemerintah Malaysia dan LSM-LSM melalui mekanisme *UNHCR Social Protection Fund* untuk membantu mendapatkan pekerjaan sementara. Namun dengan meningkatnya jumlah tersebut, Malaysia telah menyampaikan bahwa pihaknya tidak dapat lagi menampung tambahan pengungsi.

Menurut salah satu pengungsi dalam kapal yang terdampar di Aceh, awalnya mereka hendak menuju Malaysia, namun ditipu oleh pihak yang mengaku akan membantu mereka hingga akhirnya terdampar di Aceh utara. Mereka boleh dikatakan beruntung, karena sebelumnya pun otoritas Malaysia diketahui menolak kehadiran para pengungsi Rohingya tersebut dengan mendorong para pengungsi kembali ke laut. Demikian pula dengan otoritas Thailand yang memberlakukan hal yang sama. Hal ini sempat menuai kritik dari pengamat kemanusiaan internasional, yang menggambarkan pengungsi etnis Rohingya sebagai "bola pingpong" yang ditolak dimana-mana oleh negara-negara ASEAN.

NEWYORK POST

Sekitar 792 pengungsi Rohingya berada di Aceh Utara. Di Malaysia, ada 137.788 pengungsi, di Bangladesh sekitar 232.597, dan di Thailand 132.000 pengungsi.

Kronologi Singkat Nasib Etnis Rohingya

Nasib etnis Rohingya memiliki cerita yang cukup panjang hingga akhirnya terkatung-katung seperti saat ini. Kata "Rohingya" berasal dari "Rohang", nama kuno untuk Arakan. Etnis Rohingya tinggal di negara bagian Rakhine di Myanmar sejak abad ke-7 Masehi. Etnis Rohingya bukan berasal dari Bangladesh ataupun Bengali. Nenek moyang etnis Rohingya berasal dari campuran Arab, Turki, Afghan, dan Indo-mongoloid. Arakan saat ini merupakan bagian dari Union of Myanmar dan terletak di sisi barat laut berbatasan dengan Bangladesh. Pada tahun 1930 nama Arakan berubah menjadi Rakhine atau populer dengan sebutan Rakhaing.

Ketika rezim militer U Ne Win berkuasa di Burma tahun 1962, etnis Rohingya semakin terpuruk dengan adanya penolakan pemberian status kewarganegaraan. Situasi semakin memburuk dengan terbitnya Undang-undang Kewarganegaraan Burma tahun 1982. Berbagai kekerasan yang dialami oleh etnis Rohingya secara individu maupun kelompok telah memaksa mereka untuk mencari perlindungan dalam bentuk suaka ataupun sebagai pengungsi. Dengan status kewarganegaraa yang tidak jelas secara dari perspektif hukum status etnis Rohingya menjadi *stateless*. Pada saat kepemimpinan berpindah kepada Presiden Thein Sein, kondisi dan situasi etnis Rohingya tidak mengalami perubahan yang berarti. Penolakan pengakuan oleh rezim Presiden Thein Sein terhadap etnis Rohingya sebagai bagian dari Myanmar tercermin dalam pernyataan Sein bahwa: "*Rohingya are not our people and we have no duty to protect them*". Sein menginginkan agar etnis Rohingya berada dalam pengelolaan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) atau ditampung oleh negara ketiga.

Antara Prinsip *Non-Interference* dan Bantuan Kemanusiaan

Dalam menghadapi permasalahan etnis yang sensitif ini, ASEAN harus bersikap hati-hati. Pasalnya, ASEAN memegang prinsip *non-interference* yang melarang intervensi atas urusan dalam negeri satu sama lain. Kesembilan negara anggota ASEAN selain Myanmar tidak bisa membuat keputusan yang mengharuskan Myanmar merevisi kebijakannya terkait status *stateless* Rohingya. Mereka juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa atau bahkan sekedar meminta Myanmar memperlakukan etnis Rohingya dengan selayaknya. Hal tersebut murni menjadi hak dari Myanmar, dan ASEAN hanya dapat mengapresiasi kemajuan yang terjadi, atau dalam kasus pengungsi Rohingya ini, membantu memberikan bantuan kemanusiaan dan menyelamatkan para pengungsi.

Karenanya menanggapi nasib miris etnis Rohingya dan Bangladesh tersebut, para Menteri Luar Negeri tiga negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand, mengadakan pertemuan di Kuala Lumpur pada tanggal 20 Mei 2015 untuk membahas solusi bersama dalam menyelesaikan masalah regional itu. Ketiga Menteri menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang dialami ribuan warga etnis Rohingya, termasuk sekitar enam hingga delapan ribu lainnya yang masih terapung di laut Andaman dan Selat Malaka, sebagaimana dilaporkan UNHCR. Ketiga Menteri sepakat bahwa isu pengungsi Rohingya telah naik tingkat menjadi isu regional yang butuh penanganan bersama, dan tidak satu pun negara di ASEAN yang dapat menangani isu ini sendiri.

Atas nama kemanusiaan, para Menteri Luar Negeri ketiga negara tersebut berkomitmen untuk

mencari solusi komprehensif dengan melibatkan negara asal, transit, dan tujuan melalui prinsip *burden-sharing* dan *shared-responsibility*. Hal ini diperlukan untuk mencegah isu *irreguler migrants* agar tidak berevolusi menjadi krisis kemanusiaan di kawasan Asia Tenggara. Untuk mencegah isu *irregular migrants*, ketiga Menteri Luar Negeri menuntut agar keadilan ditegakan bagi para penyelundup dan sindikat penjualan manusia yang memanfaatkan insiden ini.

THE GUARDIAN

Kondisi pencari suaka dan pengungsi asal Rohingya Myanmar yang memprihatinkan.

ABC.NET.AU

Menumbuhkan Kemanusiaan, Mewujudkan Visi ASEAN

Tindakan yang diambil oleh Indonesia, Malaysia, dan Thailand ini patut diapresiasi. Ketiga negara tersebut telah memainkan peran cerdik dalam menjembatani antara ketidakmampuan untuk mencampuri urusan dalam negeri Myanmar dengan kepedulian akan kondisi darurat kemanusiaan di tingkat regional. Etnis Rohingya masih bisa dikatakan sebagai warga ASEAN, karena secara geografis memang menempati wilayah Myanmar yang menjadi anggota ASEAN. Selain itu, tanpa memandang kewarganegaraan pun, dalam menangani isu yang berpotensi menjadi krisis kemanusiaan, ego negara harus dikesampingkan. Sehingga solidaritas, dalam hal ini solidaritas ASEAN, harus dijalin untuk saling bahu membahu menyediakan bantuan bagi para pengungsi etnis Rohingya yang membutuhkan. Hal ini lah yang telah ditunjukkan oleh ASEAN tepatnya melalui ketiga negara tersebut.

Hal berikutnya yang dapat dilakukan atau direkomendasikan, adalah berkoordinasi untuk menangani para pengungsi hingga batas waktu yang ditentukan, atau hingga proses *resettlement* selesai. Proses panjang ini membutuhkan kerjasama, koordinasi, komitmen dan dukungan penuh dari semua pihak agar hasil yang didapatkan menjadi tepat guna. Selain itu, ASEAN akan terus mendorong anggotanya untuk memperlakukan seluruh warga negaranya dengan adil dan setara, demi menghindari insiden kemanusiaan seperti ini terulang kembali. Hal ini perlu dilakukan juga demi memenuhi visi Masyarakat ASEAN yaitu "*politically cohesive, economically integrated, socially responsible, and a truly people oriented, people centered and rules-based ASEAN*". Demi masa depan ASEAN yang lebih baik. •

DIT. POLITIK-KEAMANAN ASEAN

LANGKAH-LANGKAH YANG DIAMBIL OLEH KEMLU INDONESIA, MALAYSIA, DAN THAILAND TERKAIT ISU ROHINGNYA:

a. **Melakukan operasi *Search and Rescue (SAR)* bagi para pengungsi yang masih terapung di lautan;**
b. **Melaksanakan patroli laut terkoordinasi dan memfasilitasi evakuasi di laut ketika kapal-kapal berisi migran tersebut ditemukan;**
c. **Menyediakan bantuan kemanusiaan, termasuk *shelter,* makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya bagi migran yang terdampar di wilayah tiga negara;**
d. **Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan UNHCR dan IOM dalam mengidentifikasi dan memverifikasi imigran, termasuk mencari negara ketiga untuk proses *resettlement;***
e. **Mengaktifkan sumber daya milik *ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre)* untuk menyelesaikan krisis ini.**

NEWSOURCEGY.COM

Tindak Pidana Perdagangan Orang, salah satu kejahatan lintas negara yang melanggar aspek kemanusiaan, politik, hukum, ekonomi dan hak asasi manusia.

PERDAGANGAN ORANG
ANCAMAN NYATA KEAMANAN ASEAN

ASEAN telah menghasilkan sejumlah deklarasi dan perjanjian yang terkait kerja sama pemberantasan perdagangan manusia.

Kejahatan perdagangan orang atau *Trafficking in Persons* (TIP) merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, namun juga aspek kemanusiaan, sosial, politik, hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Di kawasan Asia Tenggara, TIP dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan lintas negara sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Declaration on Transnational Crimes* yang disahkan pada pertemuan pertama *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC*), di Filipina tahun 1997.

International Organization for Migration (IOM) memperkirakan di Indonesia terdapat sekitar 43 sampai 50 persen atau tiga hingga lima juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang merupakan korban perdagangan orang. Seluruh provinsi di Indonesia merupakan daerah asal dan tujuan perdagangan orang, dengan daerah asal paling signifikan yaitu Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan.

Hal ini membuat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menjadi salah satu prioritas dari 8 jenis kejahatan lintas negara. Sejumlah deklarasi maupun perjanjian yang terkait dengan kerja sama pemberantasan perdagangan manusia telah dihasilkan dalam kerjasama ASEAN, termasuk di antaranya dalam kerangka forum *ASEAN Chief of Police Conference (ASEANAPOL), ASEAN Director General for Imigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM)* maupun *ASEAN Tourism Ministerial Meeting*. Selain itu, terdapat sekitar 7 dokumen/deklarasi/perjanjian terkait penanganan TIP di ASEAN.

ASEAN 'Melek' TIP

Melihat urgensi dari masalah ini, pada Mei 2011 di Jakarta, melalui *ASEAN Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation against Trafficking in Persons in Southeast Asia,* para pemimpin ASEAN memandatkan pembentukan *ASEAN Convention on Trafficking in Person (ACTIP)*. Komitmen ini ditegaskan lagi dalam *Joint Statement of 8th AMMTC* (Bali, Oktober 2011). Secara umum, negara-negara anggota ASEAN sepaham bahwa sebagai salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara, tindak kejahatan perdagangan orang tidak dapat diperangi secara parsial oleh masing-masing negara.

Saat ini, seluruh negara ASEAN telah menjadi negara pihak pada *UN Convention on Transnational Organized Crimes* dimana kejahatan perdagangan orang menjadi salah satu subyeknya. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN kecuali Brunei Darussalam dan Singapura telah

me–ratifikasi *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*. Hal ini semakin menunjukkan bahwa TIP/TPPO telah menjadi sebuah isu yang disadari bersama oleh negara-negara ASEAN dan berpotensi untuk ditingkatkan menjadi sebuah langkah penyelesaian konkret.

Filipina selaku *lead shepherd* kerja sama pemberantasan kejahatan perdagangan orang di ASEAN, telah aktif membahas upaya-upaya pemberantasan kejahatan dimaksud, termasuk pembahasan mengenai pembentukan instrumen hukum tentang TIP sejak 2007. Indonesia dan Filipina mendukung dan memandang penting pembentukan ACTIP mengingat pentingnya isu ini di kawasan, dan ACTIP dapat digunakan sebagai landasan ASEAN dalam meningkatkan kerja sama pemberantasan tindak kejahatan lintas negara perdagangan orang.

> **“Sekitar 43 sampai 50 persen dari total tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah korban kejahatan perdagangan manusia.**
>
> **INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION**

Perlu Keseriusan ASEAN dan Negara Mitra

Upaya Indonesia untuk terus meningkatkan kesadaran regional mengenai keseriusan dan berbahayanya TIP/TPPO ini juga dilakukan dengan mendorong agar isu ini dapat diangkat menjadi prioritas baru dalam kerangka *ASEAN Regional Forum* (ARF). Selama ini ARF telah memiliki 4 bidang prioritas kerja sama, yaitu *Disaster Relief, Non-Proliferation and Disarmament, Counter-Terrorism and Transnational Crime,* serta *Maritime Security*. ARF dipandang sebagai wadah yang tepat untuk meningkatkan kewaspadaan regional akan TIP dan pandangan akan, sehingga Indonesia secara konsisten terus berusaha mengusulkan *Work Plan on Trafficking in Persons* di dalam ARF.

Jumlah negara anggota ARF yang mencapai 27 negara termasuk Uni Eropa tentunya akan membuat upaya penanggulangan TIP semakin terakselerasi dan didukung, jika berhasil diadopsi menjadi sebuah kerangka kerja dalam ARF. Upaya Indonesia untuk mengusulkan *Work Plan* di bidang TIP ini sudah dilakukan sejak *ARF Inter-Sessional Meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime (ARF ISM on CTTC)* ke-9 dan ke-13 pada tahun 2011 dan 2012. Kedua pertemuan sepakat untuk meningkatkan penanggulangan TIP menjadi sebuah *Work Plan* jika sudah ada negara yang berkomitmen menjadi *lead country*. Saat ini Indonesia dan Uni Eropa telah berkomitmen bersama untuk menjadi *lead countries TIP di ARF*.

Bagaimanapun bentuk upaya peningkatan kerjasama penanggulangan TIP/TPPO, baik melalui pembentukan ACTIP maupun *Work Plan* dalam ARF, Indonesia terus berupaya meningkatkan kesadaran global maupun kerja sama regional dalam isu ini. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang vokal dalam memperjuangkan isu TIP/TPPO.

Upaya Indonesia untuk terus meningkatkan kesadaran global dan kerja sama regional dalam isu ini, melalui dukungan terhadap pembentukan ACTIP dan mengusulkan *Workplan on TIP* dalam ARF menjadikan Indonesia sebagai negara yang vokal dalam memperjuangkan isu pemberantasan TIP/TPPO.●

DIT. POLITIK - KEAMANAN ASEAN

Trafficking in Person merupakan kejahatan lintas negara yang sudah menjadi perhatian khusus di ASEAN

ACEHONLINE

Densus 88, satuan khusus kontra terorisme di Indonesia.

INDONESIA TERDEPAN DALAM KONTRA TERORISME DI ASEAN

Indonesia bersama negara ASEAN lain berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam penanggulangan terorisme.

Terorisme menjadi sorotan Indonesia selama rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-26 atau *ASEAN Summit* di Kuala Lumpur dan Langkawi, Malaysia pada April 2015. Karena hal prinsip dan pengalaman buruk akibat tindak terorisme, bagi Indonesia terorisme adalah masalah yang harus diselesaikan sampai ke akarnya. Dalam KTT itu, Indonesia mengangkat beberapa isu terorisme, termasuk *Islamic State of Iraq and Sham* (ISIS).

Indonesia memiliki komitmen dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan terorisme, serta berkontribusi terhadap upaya-upaya nyata dalam pemberantasan terorisme. Dalam konteks kerja sama di bawah kerangka PBB dan dalam menunjukkan komitmennya tersebut, Indonesia telah meratifikasi delapan instrumen internasional terkait penanggulangan terorisme yang sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia.

Indonesia juga terus memanfaatkan peluang kerja sama di bawah kerangka *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy* (UNGCTS) melalui kerja sama dengan *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), *Terrorism Prevention Branch-United Nation Office for Drugs and Crime* (TPB-UNODC), dan *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate* (UNCTED). Saat ini, Indonesia merupakan salah satu anggota A*dvisory Board* dari *UN Counter-Terrorism Center*.

Dalam kerangka multilateral lainnya, Indonesia merupakan anggota dari *Global Counter-Terrorism Forum* (GCTF). Dalam kaitan ini, Indonesia juga merupakan penggagas sekaligus *co-chairs* dari *GCTF Detention and Reintegration Working Group* (DRWG) bersama Australia dan telah menyelenggarakan pertemuan pertamanya di Bali pada 12-13 Agustus 2014.

Sebagai negara dengan jumlah populasi penduduk muslim terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar ketiga, dan negara dengan tingkat multikultularisme yang tinggi, Indonesia berperan aktif dalam menyelenggarakan berbagai i*nterfaith dialogue* sebagai salah satu upaya kontra-terorisme, baik dalam tingkat bilateral, regional, maupun multilateral. Hingga Desember 2014, Indonesia telah memiliki 25 negara mitra *interfaith dialogue*. Pada tingkat regional, Indonesia secara aktif berkontribusi dalam *ASEM Interfaith Dialogue,* dan juga merupakan pemrakarsa *Asia Pacific Interfaith Dialogue* yang telah berkembang menjadi *Regional Interfaith Dialogue* pada tahun 2004 yang terdiri dari 15 negara.

Di tingkat regional, Indonesia juga berperan aktif dalam penanggulangan

terorisme dan radikalisme melalui berbagai mekanisme kerja sama ASEAN dalam upaya mewujudkan suatu instrumen hukum yang mengikat, antara lain melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), *ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus* (ADMM-Plus), *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan berbagai mekanisme kerja sama ASEAN dengan beberapa mitra wicara, seperti *ASEAN-Japan Counter-Terrorism Dialogue* (AJCTD).

Dimulai dari Dalam Negeri

Terkait upaya program deradikalisasi bagi para terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada 2013 telah meluncurkan *Blueprint* Deradikalisasi yang bertujuan agar seluruh kegiatan deradikalisasi di Indonesia dapat dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi secara nasional sehingga implementasinya tepat sasaran, terstruktur, dan berkelanjutan. Guna mendukung pengembangan program deradikalisasi, BNPT telah membuka pusat rehabilitasi di Sentul bagi narapidana teroris yang akan selesai menjalani masa hukuman.

Isu *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) yang baru-baru ini muncul ke permukaan, telah menjadi isu mengemuka dalam pembahasan penanggulangan terorisme. Hal ini mengingat cukup tingginya angka keterlibatan para *"fighters"* yang masuk ke daerah konflik saat ini, seperti Irak dan Suriah, dan bergabung dengan kelompok *Islamic State of Iraq and Sham/The Levant (Islamic State*/ISIS/ISIL).

Indonesia juga menyadari adanya keterlibatan sejumlah WNI yang menjadi *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) ke Suriah ataupun yang telah me–nyatakan dukungannya untuk ISIS. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Drs. Saud Usman Nasution, telah menyampaikan bahwa pihaknya telah mendeteksi adanya sejumlah WNI yang berangkat ke Suriah untuk menjadi *foreign fighters* serta yang menyampaikan dukungan secara terbuka terhadap kelompok ISIS. Terkait dengan keterlibatan WNI di ISIS/L, berdasarkan informasi yang diterima dari BNPT terdapat sekitar 514 WNI yang telah berangkat menuju Suriah dan Irak untuk bergabung dengan ISIS/L. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi Pemerintah RI, khususnya bagi *foreign fighters* WNI yang akan kembali ke Indonesia karena dipandang dapat menyebarkan paham radikalisme dan melakukan tindak terorisme.

REUTERS

Melihat perkembangan masalah terorisme yang mengkhawatirkan dan besarnya perhatian Indonesia terhadap isu tersebut, Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan cara-cara penanggulangan terorisme di tataran nasional maupun kawasan. Dalam kerangka ASEAN, para Menteri Luar Negeri ASEAN telah mengeluarkan *ASEAN Foreign Ministers' Statement on the Violence and Brutality Committed by Extremist Organizations in Iraq and Syria* pada Pertemuan *AMM Retreat*, tanggal 28 Januari 2015, di Kota Kinabalu, Malaysia. Para Menteri Luar Negeri mengutuk kekejaman dan kekerasan yang dilakukan oleh organisasi ekstrimis dan kelompok radikal di Irak dan Suriah. Para Menteri Luar Negeri mempertegas komitmen terhadap implementasi penuh dari *ASEAN Convention on Counter Terrorism*, yang ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2007 dan *ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* yang disahkan pada tanggal 30 Juni 2009.

Dengan adanya upaya aktif dan serius dari Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme di tingkat nasional dan regional, Indonesia berkomitmen untuk menjadi yang terdepan dalam upaya penanggulangan terorisme. Sesuai dengan mandat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, hal ini termasuk ke dalam bentuk nyata Indonesia dalam ikut menjaga ketertiban dunia.●

DIT. POLITIK - KEAMANAN ASEAN

SINERGI KEMLU DAN PENELITI DALAM UPAYA KONTRA TERORISME

MILITARYDEGREEPROGRAMS.ORG

Gerakan radikalisme dan kelompok teroris terus berevolusi dengan modus operandi yang kerap berubah. Maka, strategi deradikalisasi perlu terus dievaluasi dan disesuaikan.

Dalam menyusun strategi penanggulangan terorisme yang komprehensif, faktor konflik internal perlu menjadi perhatian. Ini karena, konflik internal merupakan salah satu penyebab tumbuhnya radikalisme dan ekstrimisme di suatu negara Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Polkam ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, M. Chandra W. Yudha, dalam pembukaan seminar *"Conflict Resolution and Anti-Terrorism in ASEAN Countries"* di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, tanggal 2-3 April 2015.

Direktur Polkam ASEAN Kemlu lebih lanjut menyampaikan bahwa gerakan radikalisme dan kelompok teroris terus berevolusi dengan modus operandi yang kerap berubah. Strategi deradikalisasi perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan yang terjadi sehingga ancaman radikalisme dapat diatasi secara efektif. Hal itulah yang membuat kedua penelitian dalam seminar ini dinilai penting sebagai upaya bersama dalam memahami situasi yang sesungguhnya terjadi di lapangan dan mencari strategi yang efektif guna menanggulangi ancaman terorisme di kawasan ASEAN.

Kepala Divisi Hubungan Internasional Mabes Polri, Irjen Pol. Sugeng Priyanto, selaku Sekretaris SOMTC-Indonesia juga mengatakan bahwa kedua penelitian tersebut sangat berguna sebagai salah satu upaya untuk mengkaji kesuksesan program pemberantasan terorisme di ASEAN, termasuk program deradikalisasi dan penanggulangan *violent extremism* yang telah dilakukan oleh masing-masing negara.

Lima orang peneliti untuk topik "*Conflict Resolution and Anti-Terrorism in ASEAN Countries*", adalah Titik Firawati (Universitas Gadjah Mada, Indonesia), Keokam Kraisoraphong (Chulalongkorn University, Thailand), Allan A. Delos Reyes, Carolina G. Hernandez dan Dennis F. Quilala (Institute for Strategic and Development Studies, Filipina). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengkaji bagaimana pengaruh konflik internal terhadap

munculnya radikalisme dan ekstrimisme di sejumlah negara anggota ASEAN serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik internal sebagai bagian dari kebijakan anti-terorisme dan kontra-radikalisme.

Tim Peneliti menyampaikan pokok-pokok hasil penelitian diantaranya: kekerasan komunal yang terjadi di Poso merupakan contoh konflik internal yang bertransformasi menjadi terorisme ;aksi terorisme di Thailand Selatan merupakan konsekuensi dari konflik internal yang berbasiskan agama dan etno-nasionalisme dan akar penyebabnya adalah diskriminasi komunitas Muslim Melayu dalam hal etnisitas, budaya, agama, dan bahasa; dan kemunculan kelompok-kelompok teroris di Filipina dilatarbelakangi oleh beragam faktor, antara lain faktor ideologi, terutama komunisme; faktor politik, terutama visi mewujudkan negara Islam, dan faktor marjinalisasi berbasiskan agama.

Sementara untuk topik *"Mapping and Evaluating De-radicalization and Disengagement Programs in ASEAN"*, terdapat tujuh orang peneliti, yyaitu Eric Hiariej, Taufik Adnan Amal, Rizal Panggabean, Poppy S. Winanti, dan Ayu Diasti Rachmawati (INSEP, Indonesia); Sulog G. Bra (Graduate School of Mindanao State University, Filipina); dan Meg Kagawa (Hiroshima University, Jepang). Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan program-program deradikalisasi dan disengagement di ASEAN serta mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan program-program tersebut. Penelitian difokuskan pada program-program deradikalisasi dan *disengagement* di Indonesia dan Filipina sebagai dua negara anggota ASEAN yang paling marak dengan radikalisme dan terorisme.

> ***"Kekerasan komunal yang terjadi di Poso merupakan contoh konflik internal yang bertransformasi menjadi terorisme.***

Adapun pokok-pokok hasil penelitian mencakup program-program deradikalisasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh aktor-aktor pemerintah maupun non-pemerintah, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Yayasan Prasasti Perdamaian, Lazuardi Birru, *Search for Common Ground (SFCG)*, dan *International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP);* Program-program tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik serta masih terfokus pada isu kemiskinan, kesejahteraan, fundamentalisme agama, dan psikologi sebagai akar penyebab radikalisasi. Sementara pada kasus di Filipina upaya mengatasi radikalisasi tidak melalui program deradikalisasi dan *disengagement*, melainkan melalui program perdamaian, selain itu, Pemerintah Filipina juga menggunakan istilah rehabilitasi atau reformasi dalam upaya deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan.

Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, I Gusti Agung Wesaka Puja, menyampaikan beberapa pelajaran berharga yang dapat ditarik dari kegiatan seminar ini. Pertama, konflik internal berskala kecil dapat bereskalasi menjadi konflik besar yang mengancam keamanan kawasan, oleh karena itu pemerintah perlu segera mengelola konflik yang ada sebelum bereskalasi lebih jauh dan bertransformasi menjadi gerakan terorisme. Kedua, pentingnya aspek kemanusiaan dalam program deradikalisasi membuat program-program deradikalisasi ke depan perlu memperhatikan faktor hubungan keluarga, nilai-nilai dan pandangan hidup, serta aspirasi personal para mantan pelaku terorisme. Lebih lanjut Dirjen Kerja Sama ASEAN berharap bahwa masukan dan rekomendasi yang dihasilkan dari seminar ini dapat menyempurnakan hasil kedua penelitian dimaksud sehingga berguna bagi penyusunan strategi penanggulangan terorisme secara komprehensif dan efektif.

Pelaksanaan kedua seminar tersebut dimaksudkan untuk mendiseminasikan hasil-hasil proyek penelitian dan untuk mendapatkan masukan serta pandangan dari para peserta untuk melengkapi laporan akhir penelitian. Kedua penelitian itu merupakan dua dari lima proyek usulan Indonesia dalam kerangka kerja sama AJCTD fase ke-2 (2012-2015) yang pendanaannya ditanggung oleh skema *Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF)*. Pada kelima proyek dimaksud, Direktorat Politik dan Keamanan ASEAN bertindak sebagai proponen kegiatan bersama dengan beberapa institusi lainnya, termasuk Kepolisian RI dan Indonesian *Institute for Society Empowerment (INSEP)*. Seminar tersebut turut dihadiri pula oleh perwakilan *Senior Officials' Meeting on Transnational Crime (SOMTC)* negara-negara anggota ASEAN kecuali Kamboja, Laos, dan Singapura, serta Sekretariat ASEAN, dan para peneliti pada kedua proyek penelitian yang dibahas di seminar ini.●

DIT. POLITIK - KEAMANAN ASEAN

REKOMENDASI KRUSIAL DARI PENELITI KEPADA ASEAN ANTARA LAIN:

1. **Penguatan institusi penegak hukum dalam melaksanakan program deradikalisasi dan disengagement di masing-masing negara;**
2. **Penguatan kerja sama intelijen antar negara anggota ASEAN;**
3. **Pemanfaatan media online dan sosial dalam melaksanakan program deradikalisasi dan disengagement;**
4. **Peran konstruktif yang harus dimainkan ASEAN dalam resolusi konflik dan memperkuat peran inter-faith organizations dalam melawan terorisme;**
5. **Memperkuat peran dan fungsi ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR) melalui upaya-upaya untuk menciptakan perdamaian dan toleransi.**

KTT KE-26 ASEAN
PERKUAT SENTRALITAS ASEAN

ESTABLISHMENTPOST.COM

ASEAN harus memperkuat sentralitas dan kapasitas institusionalnya seiring dengan meningkatnya ketergantungan ekonomi dan perkembangan dinamika keamanan di kawasan. Demikian dikatakan oleh Perdana Menteri Malaysia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN di Kuala Lumpur, April lalu. Sementara, Indonesia menyampaikan agar semua pihak yang terlibat dalam isu Laut Tiongkok Selatan (LTS) mampu menahan diri demi tercapainya stabilitas dan keamanan di kawasan. "Indonesia siap menjadi *honest broker,*" ujar Presiden Joko Widodo.

Isu ekonomi dan Laut Tiongkok Selatan mendapatkan porsi yang cukup besar dalam agenda KTT ke-26 ASEAN yang lalu. Para Pemimpin ASEAN menekankan bahwa kerja sama dengan mitra wicara, termasuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT), harus bermanfaat dan dapat memperkuat sentralitas ASEAN di kawasan. Pemimpin ASEAN juga menyoroti pentingnya mengurangi hambatan perdagangan berupa *non-tariff-barriers,* upaya implementasi ASEAN *Single Window,* serta peningkatan perdagangan antar ASEAN dengan negara-negara mitra dagang ASEAN. Presiden RI juga menggarisbawahi pentingnya mencapai target peningkatan perdagangan *intra-trade* ASEAN menjadi 35-40 persen dalam 5 tahun ke depan.

Presiden RI menggarisbawahi pentingnya meningkatkan perdagangan intra-trade ASEAN menjadi 35-40 persen dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Selain kedua isu tersebut, KTT membahas berbagai isu lainnya, diantaranya kerja sama konsuler sesama negara anggota ASEAN, penyamaan zona waktu ASEAN (*Common Time Zone for ASEAN Capitals)*, perampingan jumlah pertemuan ASEAN, dan pembahasan Masyarakat ASEAN paska 2015. Menanggapi perkembangan situasi di sejumlah kawasan beberapa waktu belakangan, Indonesia mendorong kerja sama konsuler antar negara anggota ASEAN di sejumlah negara yang berkonflik seperti Yaman dan Mesir beberapa waktu lalu. Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden RI mengenai pentingnya ASEAN dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat termasuk diantaranya melalui perlindungan warga negara dan pekerja migran.

Menanggapi rencana penyamaan zona waktu ASEAN menjadi GMT +8 (sama dengan Hong Kong, Australia Barat, dan RRT) hampir seluruh negara ASEAN menyatakan perlunya kajian secara mendalam terhadap rencana tersebut., mengingat hal itu akan memberikan dampak yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Terkait dengan perampingan jumlah pertemuan

ASEAN, KTT ke-26 mendukung usulan Laos untuk menyelenggarakan Pertemuan KTT ke-28 ASEAN *back-to-back* dengan KTT ke-29 ASEAN pada bulan November 2016.

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-26 ASEAN Sesi Pleno diselenggarakan pada tanggal 27 April 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertemuan dihadiri oleh Presiden RI beserta seluruh Kepala Negara/Pemerintahan Negara Anggota ASEAN dan Sekjen ASEAN. Agenda utamanyai adalah mengenai *Establishment of ASEAN Community 2015, ASEAN Community's Post-2015 Vision,* serta *External Relations and Future Direction.* KTT ini menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu: Kuala Lumpur *Declaration on a People-Oriented and People-Centered ASEAN, Langkawi Declaration on Global Movement of Moderates, Declaration on Institutionalizing the Resilience of ASEAN and its Communities and People to Disasters and Climate Change*, serta *Chairman's Statement of the 26th ASEAN Summit.*

Pada KTT tersebut, Sekjen ASEAN juga melaporkan perkembangan implementasi *Roadmap of ASEAN Community* di keseluruhan pilar yang telah mencapai 92.5%, dengan perincian dari masing-masing pilar, yaitu: Ekonomi 90.5%, Sosial-Budaya 96.75% dan Politik-Keamanan 89%.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Presiden RI, Joko Widodo (kedua dari kanan) saat menghadiri KTT ke-26 ASEAN di Kuala Lumpur, bersama pemimpin negara/pemerintahan ASEAN lainnya.

POIN PENTING PRESIDEN RI DI KTT KE-26 ASEAN

1. **Presiden RI menekankan perlunya ASEAN mempersempit kesenjangan antara kesepakatan yang dicapai dengan manfaat nyata bagi masya–rakat, antara lain melalui beberapa upaya penting, yaitu:**
   a. **mendorong penyelesaian masalah perbatasan.**
   b. **penguatan kerjasama maritim melalui mekanisme ASEAN dan diadopsinya mekanisme hukum untuk berantas IUU Fishing.**
   c. **perjanjian untuk melindungi pekerja migran besarta keluarganya.**
2. **Pentingnya mencapai target peningkatan perdagangan intra-trade ASEAN menjadi 35-40 persen dalam 5 tahun ke depan.**
3. **Perlunya semua pihak menahan diri demi tercapainya stabilitas dan perdamaian di LTS dan menyampaikan kesiapannya untuk menjadi honest broker.**
4. **Indonesia mendorong kerja sama konsuler antar negara anggota ASEAN di sejumlah negara yang berkonflik seperti Yaman dan Mesir beberapa waktu lalu.**

HASIL KESEPAKATAN KTT KE-26 ASEAN

KTT ke-26 ASEAN yang diselenggarakan di Kuala Lumpur dan Langkawi, Malaysia ini menghasilkan beberapa kesepakatan penting, yaitu:

1. **Kuala Lumpur Declaration on a People-Oriented and People-Centered ASEAN,**
2. **Langkawi Declaration on Global Movement of Moderates.**
3. **Declaration on Institutionalizing the Resilience of ASEAN and its Communities and People to Disasters and Climate Change.**
4. **Chairman's Statement of the 26th ASEAN Summit**

PEMIMPIN ASEAN DAN AIPA PASTIKAN TERBENTUKNYA MASYARAKAT ASEAN

Pada 27 April 2015 telah dilaksanakan pertemuan para Pemimpin ASEAN dengan Perwakilan *ASEAN-Interparliamentary Assembly (AIPA)* di Kuala Lumpur, Malaysia dalam rangkaian KTT ASEAN ke-26. Pertemuan dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Mohd. Najib Tun Abdul Razak dan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Parlemen Indonesia diwakili oleh Teguh Juwarno, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

PM Malaysia dalam sambutan pembukaannya menyampaikan apresiasi terhadap peran AIPA selama ini yang telah mendukung terwujudnya Masyarakat ASEAN 2015 melalui legislasi yang telah disahkan di parlemen masing-masing negara. PM Malaysia mengharapkan pertemuan ini dapat terus dilaksanakan mengingat ASEAN sedang mengagendakan *ASEAN Post-2015 Vision* dan dukungan parlemen menjadi penting untuk mewujudkannya. Sebagai Presiden AIPA, Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia mewakili seluruh perwakilan AIPA menyampaikan pernyataan mengenai dukungan dan kerja sama AIPA bersama eksekutif untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015.

Perwakilan AIPA menggarisbawahi bahwa dalam pembentukan Ma–syarakat ASEAN 2015 perlu pula didorong upaya masyarakat kawasan yang *rules-based*. Untuk itu, konsistensi antar harmonisasi dan komitmen peraturan domestik dengan peraturan kawasan perlu diprioritaskan. Selain itu, AIPA mendorong kerja sama ASEAN dalam penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas negara, penyelundupan manusia, *cyber crime* dan pencucian uang.

Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, AIPA menegaskan mengenai perlunya negara anggota untuk segera meratifikasi perjanjian yang telah disepakati ASEAN, utamanya *ASEAN Tourism Agreement*. AIPA berpendapat bahwa pembangunan ekonomi yang merata dapat dicapai dengan cara memfasilitasi perjanjian yang disepakati bersama mengenai isu terkait hukum atau perjanjian internasional yang mempengaruhi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN; harmonisasi peraturan tarif; mendukung *Master Plan on ASEAN Connectivity* yang mengharapkan ASEAN untuk saling terhubung guna berkontribusi dalam ASEAN yang kompetitif dan kuat.

Terhadap Masyarakat Sosial Budaya ASEAN, AIPA mendukung upaya ASEAN dalam mempromosikan persamaan jender dan perlindungan HAM, terutama hak-hak wanita, anak-anak dan usia lanjut. AIPA juga mendukung elemen-elemen mengenai perlin–dungan dan peningkatan hak-hak pekerja migran, dalam Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Dalam tanggapannya PM Vietnam dan PM Thailand, secara umum me–nyampaikan bahwa untuk mewujudkan masyarakat ASEAN yang *people-centered,* dan *rules-bassed*, diperlukan kerja sama yang kuat antara legislatif dan regional dan internasional. Selain itu, pertemuan berkala antara eksekutif dan legislatif kira–nya akan semakin menjalin hubu–ngan yang saling mendukung dan saling memiliki terhadap ASEAN.

Pertemuan memberikan perhatian pokok bagaimana ASEAN dapat menghasilkan manfaat kepada rakyatnya. Dalam kaitan ini, AIPA mengharapkan ASEAN yang berkembang menuju *people-centered,* dapat mendorong adanya pe–ngertian bersama mengenai apa yang dimaksud dengan *people-centered.* Pengertian ini penting untuk masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya dalam bekerja sama untuk mewujudkan tujuan ASEAN.

Dukungan parleman dalam ratifikasi terhadap berbagai perjanjian yang telah disepakati ASEAN kiranya perlu terus diwujudkan untuk merealisasikan komitmen ASEAN untuk menjadi masyarakat yang *rules-based* yang menjadi salah satu elemen pokok pembentukan Masyarakat ASEAN.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

MALAYSIA.GOV.MY

Sekjen AIPA saat rapat persiapan untuk melakukan pertemuan dengan pimpinan ASEAN dalam rangkaian KTT ke-26 ASEAN di Kuala Lumpur.

ASEAN COMMUNITY'S POST 2015 VISION: PETA JALAN MASA DEPAN ASEAN

STRAITTIMES.COM

Para pemimpin negara ASEAN, saat menghadiri KTT ke-26 ASEAN di Kuala Lumpur.

Indonesia terus mengupayakan pengarusutamaan isu-isu HAM dan pekerja migran pada ASEAN Community Post 2015 Vision.

High Level Task Porce (HLTF) telah menyelesaikan *first* dan *second reading* terhadap *draft ASEAN Community's Post-2015 Vision.* Indonesia pada prinsipnya menyetujui dokumen dapat disampaikan kepada ASEAN *Coodinating Council* (ACC). Singapura menyampaikan pandangan bahwa sebaiknya dokumen itu disusun dengan bahasa sederhana agar dapat diartikulasikan dengan mudah kepada masyarakat. Thailand menyatakan bahwa dokumen tersebut perlu bersifat *forward looking* dan *visionary* serta mampu menampung aspirasi generasi masa depan serta tidak terhambat oleh kendala yang dialami negara anggota ASEAN .

Beberapa hal penting dari Pertemuan tersebut, antara lain; perlunya konsultasi lebih lanjut mengenai *draft attended documents* dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan para pemangku kepentingan; pentingnya prinsip *people-centered dan people-oriented* dimana masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan visi ASEAN ke depan; ASEAN *Community Building* merupakan suatu proses yang memerlukan pendekatan integrasi yang berkelanjutan; berbagai tantangan yang mungkin dihadapi untuk mewujudkan visi Masyarakat ASEAN 2025 adalah adanya *action lines* yang sulit untuk diimplementasikan, sinkronisasi ketiga pilar Komunitas ASEAN, dan penguatan kapasitas institusional ASEAN; perlu adanya suatu mekanisme yang efektif bagi para *leaders* untuk menyampaikan visi Masyarakat ASEAN 2015 kepada Masyarakat umum.

Meskipun elemen-elemen dasar yang terdapat dalam dokumen ASEAN *Communitys's Post 2015 Vision dan APSC attended documents* telah disepakati oleh seluruh negara anggota ASEAN, namun masih terdapat berbagai isu lintas sektoral (*cross cutting issues)* yang belum tercermin pada *attendant documents* tersebut. Indonesia dalam hal ini perlu terus mengupayakan pengarusutamaan isu-isu pokok seperti Hak Asasi Manusia (HAM) dan pekerja migran pada *ASEAN Community Post 2015 Vision* dan *attendant documents*. Koordinasi yang lebih erat dengan K/L terkait perlu terus dilakukan agar dokumen ini sesuai dengan kepentingan dan prioritas Indonesia dan juga tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi di kawasan dan dunia internasional di masa yang mendatang.

Pada pertemuan itu, Delegasi RI dipimpin oleh Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN dan didampingi oleh Direktur Politik dan Keamanan ASEAN, Direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan-Kementerian Luar Negeri, Asdep Kerja sama ASEAN-Kemenpolhukam serta staf dari Ditjen Kerja Sama ASEAN-Kementerian Luar Negeri dan PTRI ASEAN. •

SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

PEMIMPIN ASEAN BAWA

Untuk menegaskan komitmen bahwa ASEAN dekat dengan masyarakat luas, para pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan dengan tiga unsur masyarakat. Yaitu dari kalangan pebisnis, pemuda, dan masyarakat madani. Pertemuan ini diselenggarakan pada 27 April 2015, sebagai bagian dari rangkaian dari KTT ke-26 ASEAN, di Malaysia,

Pertemuan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia Dato' Sri Mohd Najib Tun Razak, dan turut dihadiri oleh kepala negara/ pemerintahan ASEAN. Pada pertemuan dengan kalangan pebisnis, yaitu *ASEAN Business Advisory Council (ABAC)*, delegasi RI dipimpin oleh Presiden RI. Sementara, untuk sesi pertemuan dengan pemuda dan masyarakat madani, delegasi RI dipimpin oleh Menteri Luar Negeri RI. Berikut ini laporan ketiga pertemuan itu:

PERTEMUAN DENGAN *ASEAN BUSINESS ADVISORY COUNCIL* (ABAC)

Pada pertemuan pemimpin ASEAN dengan ABAC, kalangan pebisnis memberikan beberapa rekomendasi untuk mensukseskan Masyarakat ASEAN. Antara lain, pembentukan ASEAN *Lane* di bandara; penerbitan ASEAN *Business Travel Card* untuk memfasilitasi pergerakan para pengusaha di negara-negara ASEAN; dukungan terhadap kelompok perempuan dan pemuda; pemutakhiran website ASEAN; serta promosi pusat jajanan makanan dan cafe ASEAN di berbagai kota di negara anggota ASEAN.

Sementara rekomendasi dari pebisnis yang bersifat jangka panjang, diantaranya: pembentukan *ASEAN Micro Small and Medium Enterprises Bank (MSME);* penghapusan *Non Tariff Measures/Non Tariff Barries (NTM/ NTB)* untuk *Priority Integration Sector* (PIS); dukungan pelaksanaan Open *Sky ASEAN* melalui pembangunan *ASEAN Pilot Training Centre, ASEAN Airport Funds*, serta *Crash Driven Initiatives;* dan perumusan *code of conduct for Migrant Workers*. ABAC juga mengharapkan agar dapat dilibatkan delam perumusan ASEAN *Community's Post-2015 Vision.*

Malaysia menyambut baik baik rekomendasi ABAC dan menyampaikan pandangan bahwa rekomendasi tersebut dapat diterapkan. Sementara itu, Filipina menekankan bahwa program yang dilaksanakan harus bermanfaat bagi masyarakat luas. Fillipina dan Thailand menyampaikan agar fokus dapar diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pertimbangan bahwa UMKM berperan penting sebagai tulang punggung perekonomian semua negara anggota ASEAN.

PERTEMUAN DENGAN PERWAKILAN PEMUDA ASEAN

Pemuda ASEAN yang diwakili oleh perwakilan dari Malaysia memberikan dukungan terhadap upaya menjadikan ASEAN berorientasi dan berpusat pada masyarakat. Perwakilan pemuda berpandangan bahwa salah satu penghambat laju integrasi adalah kesenjangan pembangunan. Kesenjangan ini terlihat dari masih adanya kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke pendidikan dasar dan hidup di bawah garis kemiskinan.

Pemuda ASEAN juga menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan ASEAN Youth Forum 2015 yang telah diselenggarakan pada bulan April 2015, di Kuala Lumpur, Malaysia. Sesuai dengan hasil forum tersebut, disampaikan harapan agar ASEAN dapat membentuk *ASEAN Youth Secretariat* yang mampu mengakomodasi kepentingan pemuda dalam berbagai kerangka kerja sama ASEAN. Sejumlah program *"quick wins"* ASEAN

ASEAN MERAKYAT

ASEANBAC.ORG

THEPROJECTX.COM

Youth Secretariat diantaranya adalah internship program, hibah pendidikan, serta penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai Masyarakat ASEAN.

Beberapa isu yang menjadi perhatian pemuda antara lain: perdamaian dan perlindungan pemuda di area konflik; pemerintahan yang baik yang menjunjung nilai-nilai demokrasi; akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi dengan penekanan pada pendidikan inklusif dan kebebasan akademis; penguatan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; pemberdayaan perempuan; perlindungan hak pekerja migran dan pengungsi.

Menteri Luar Negeri RI menyampaikan penghargaan atas penyelenggaraan *ASEAN Youth Forum* 2015. Selaku generasi penerus ASEAN, pemuda diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap masyarakat ASEAN. Pemerintah Indonesia mendukung kegiatan kepemudaan terutama kewirausahaan dan kesukarelawanan, serta mengharapkan pemuda dapat menjadi agen perubahan di masyarakat.

PERTEMUAN DENGAN ORGANISASI MASYARAKAT MADANI

Pertemuan dengan Organisasi Masyarakat Madani *Civil Society Organization-CSO)* pada KTT ke-26 ASEAN ini sekaligus merupakan peringatan 10 tahun penyelenggaraannya.

Perwakilan CSO dari Malaysia, *Mr. Jerald Joseph of* Pusat Komnas, selaku *Chair* dari *ASEAN Civil Society Conference/ASEAN People's Forum (APF*) 2015 menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Malaysia yang telah mendukung penyelenggaraan APF 2015 di Kuala Lumpur. Lebih lanjut ia menyampaikan harapan agar CSO dapat bekerja sama dengan pemerintah agar dapat memperoleh solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi bersama.

CSO mengharapkan masukan dari pemerintah negara anggota ASEAN terhadap permintaan yang telah mereka sampaikan pada tanggal 17 Februari 2015. Disampaikan juga sejumlah *concern* CSO atas situasi dan perkembangan yang terjadi di kawasan, antara lain adalah mengenai isu perlindungan hak pekerja migran, status masyarakat Rohingya, pemasyarakatan ide multi-partai pada beberapa negara, maraknya korupsi, eksekusi terpidana mati, penculikan dan penghilangan pe–juang HAM, ekstrimisme, eksploitasi air dan tanah yang berlebihan, serta tindakan-tindakan diskriminasi.

Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat narkoba. Lebih dari 4 juta masyarakat Indonesia adalah pecandu narkoba dan puluhan orang meninggal setiap hari. Indonesia telah menjadi pasar terbesar penyebaran narkoba dengan 158 juta gram kokain didistribusikan di Indonesia per tahun, sementara peredaran *crystal meth* mencapai 219 juta gram per tahun. Peredaran narkoba tersebut tidak hanya ditujukan kepada remaja, tetapi juga siswa-siswi usia sekolah dasar.

Keberadaan CSO penting bagi proses pembentukan Masyarakat ASEAN

P.M. Malaysia di penghujung acara menyampaikan bahwa keberadaan CSO penting bagi proses pembentukan Masyarakat ASEAN. Kedua pihak sama-sama memiliki perhatian terhadap isu hak asasi manusia, dan kebebasan sipil untuk mencapai masyarakat yang matang. Kerja sama yang baik antara keduanya akan menghasilkan Masyarakat ASEAN yang kuat, stabil, damai, dan kohesif. •

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

KEMLU BEKALI DIRI DENGAN PELATIHAN INCIDENT COMMAND SYSTEM

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Peserta pelatihan ICS tengah berdiskusi kelompok.

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Nur Rochma Amaliah dari Direktorat KFA bersama instruktur utama ICS, Rusty Witwer

Kementerian Luar Negeri, diwakili Direktorat Kerja Sama Fungsional ASEAN (KFA), berpartisipasi pada pelatihan *Basic Intermediate Incident Command System (ICS)* tanggal 16-20 Maret 2015 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB BNPB), Kawasan *Indonesia Peace and Security Centre (IPSC)*, Sentul, Bogor.

Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh BNPB bekerjasama dengan *United States Forest Service* (USFS) dan *United States Agency for International Development (USAID)*. Pelatihan diikuti oleh 24 peserta dari berbagai kementerian dan lembaga yakni, BNPB, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, TNI, POLRI, BMKG, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, BASARNAS, BPBD Provinsi DKI Jakarta, BPBD Provinsi Jawa Barat, dan Pusat Krisis Universitas Indonesia.

Tujuan pelatihan adalah untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang ICS sebagai refe–rensi dalam menjalankan tugas sehari-hari di bidang penanggula–ngan bencana. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan para peserta yang merupakan mitra BNPB dapat me-review Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana yang telah dimiliki Indonesia dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.Pelatihan selama 5 hari tersebut difasilitasi oleh berbagai instruktur yang berpengalaman dalam ICS, diantaranya adalah Mr. Rusty Witwer (USFS), Regina Rahadi (Konsultan USFS), Kol. Czi. Ahmad Faizal (Markas Besar TNI Angkatan Darat), Arshinta (YAKKUM), dan Supriyati (BNPB). ICS pada awalnya diciptakan oleh USFS pada tahun 1968 untuk menanggulangi kebakaran hutan, namun sistem ini kemudian diaplikasikan oleh hampir semua lembaga tanggap bencana di Amerika. Saat ini ICS telah diadaptasi penggunaannya di 35 negara.

Tujuan pelatihan adalah untuk memberikan referensi dalam menjalankan penanggulangan bencana.

Pelatihan dibuka oleh Kepala Pusdiklat PB BNPB dr. Bagus Tjahjono MPH yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan diadakan pelatihan ini adalah selain untuk meningkatkan pemahaman mengenai ICS, namun juga untuk membentuk *"pool of trainers"* yang akan mengajarkan tentang ICS kepada para pemangku kepentingan di Indonesia.

Kepala BNPB Dr. Syamsul Ma'a–rif, M.Si ketika melakukan kunjungan ke tempat pelaksanaan pelatihan, menyampaikan bahwa urusan kebencanaan bukan hanya urusan kemanusiaan saja, namun sudah menjadi urusan politik global yang mempengaruhi keputusan pemimpin dunia. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini, maka Indonesia dapat mengadaptasi ICS dan memadukannya dengan kearifan lokal sehingga kemampuan penanggulangan bencana Indonesia semakin kuat dan dapat bersaing di dunia internasional.

Dalam upacara penutupan, mewakili seluruh peserta pelatihan ICS, Nur Rochma Amaliah dari Direktorat KFA menerima sertifikat kelulusan yang diserahkan langsung oleh Kepala Pusdiklat PB BNPB dan instruktur utama ICS Mr. Rusty Witwer.●

DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

WASPADA CYBERCRIME DI ERA MEA

LIBERTIES.EU

Cybercrime kini menjadi ancaman yang serius bagi perekonomian kawasan.

Negara-negara ASEAN tidak hanya perlu memperhatikan masalah keamanan di sektor-sektor fisik saja, seperti masalah perbatasan, human trafficking, imigran ilegal, *drug trafficking,* dan kejahatan transnasional lainnya. Masalah *cybercrime* juga perlu jadi perhatian. Ini karena, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, menyebabkan *cybercrime* kini menjadi ancaman yang serius bagi perekonomian dan kepentingan nasional suatu negara.

Saat ini, semua sektor baik perusahaan, bank, maupun instansi pemerintah sudah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung melalui jaringan internet. Hal ini memungkinkan terjadinya serangan yang dilakukan *hacker* melalui jaringan tersebut. Serangan bisa berupa pencurian data-data penting dan rahasia, atau bahkan peretasan pada data-data perbankan yang akhirnya bisa berimbas pada terganggunya perekonomian suatu negara.

Selain itu, pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean, yang membebaskan sektor perdagangan antar negara-negara anggota, akan meningkatkan persaingan. Setiap pihak, termasuk perusahaan-perusahaan akan mencari berbagai cara untuk memenangkan persaingan di era perdagangan bebas ini. Tidak menutup kemungkinan jika momen ini dimanfaatkan para hacker yang bekerja baik secara independen maupun berdasarkan permintaan dari suatu pihak, untuk mengambil keuntungan pribadi.

Indonesia mendapat sekitar 42.000 serangan cybercrime per hari di tahun 2013.

Bukan hal baru jika data penting suatu perusahaan diretas oleh pihak lain. Seperti yang dilaporkan *IT News,* 600 ribu data pribadi pelanggan Restoran Waralaba D*omino's Pizza* dicuri oleh sekelompok *hacker* yang menamakan dirinya sebagai *'Rex mundi'*. Kelompok tersebut meminta tebusan sebesar 30 ribu euro atau setara dengan US$ 40.600. Contoh lainnya, seperti dilansir laman *Washington Post*, sebanyak dua lusin rancangan sistem senjata, termasuk pertahanan misil serta armada tempur udara dan laut milik Departemen Pertahanan AS, berhasil diakses oleh *hacker*, yang diduga berasal dari Tiongkok.

Maraknya aksi kejahatan yang dilakukan melalui dunia maya ini bukan tanpa usaha penyelesaian dan pencegahan. Negara-negara sudah memiliki Undang-Undang khusus yang mengatur permasalahan *cybercrime* ini. Di Indonesia, terdapat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun, karena kejahatan ini dilakukan melalui dunia maya, maka sangat sulit untuk menemukan pelakunya. Akibatnya, angka peretasan data oleh *hacker* kian meningkat. Simak saja. Menurut laporan lembaga pengawasan internet Akamai, pada kuartal kedua 2013, jumlah serangan *cyber* dari Indonesia meningkat sangat pesat menempati urutan pertama di dunia, mengalahkan Tiongkok.

Indonesia pun tak luput dari serangan *cyber*. Menurut *ID-SIRTII (Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure),* Indonesia mendapat sekitar 42.000 serangan per hari di tahun 2013. Hal ini memperlihatkan masih sangat buruknya kondisi keamanan informasi Indonesia.

Upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan pencegahan. Di mana pihak perusahaan maupun instansi pemerintah lah yang harus meningkatkan sistem keamanan data-datanya. Sebagaimana dilansir dalam berita harian *online* Analisa, Menteri Komunikasi dan Informatika negara-negara ASEAN telah menyadari hal ini dan memberi perhatian khusus pada ancaman permasalahan *cybercrime*. Untuk Indonesia sendiri, pemerintah sedang menggodok pembentukan Badan *Cyber* Nasional. Yang menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, akan berada di bawah presiden. Hal ini penting, guna mencegah terjadinya pencurian informasi yang dapat mengganggu bahkan merusak perekonomian dan kestabilan politik negara.●

SETDITJEN KERJA SAMA ASEAN

KERJA SAMA MARITIM PERERAT HUBUNGAN ASEAN-REPUBLIK KOREA

Bali kembali menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan penting antara ASEAN dan Mitra Wicaranya. Pertemuan 19th *ASEAN-Republic of Korea (ROK) Dialogue* telah diselenggarakan di Hotel Padma, Legian, Bali pada tanggal 28-29 Mei 2015 lalu. Dua isu penting yang menjadi fokus pertemuan antara lain adalah terkait kerja sama maritim dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang juga menjadi isu prioritas ASEAN di tahun 2015.

"Kehadiran ROK, yang juga menjadi anggota *East Asia Maritime Forum (EAMF*), diharapkan dapat mendukung pemberantasan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di kawasan," demikian disampaikan oleh Ketua SOM Indonesia, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, I Gusti Agung Wesaka Puja, sebagai Ketua Delegasi RI pada pertemuan ini.

"Penanganan *IUU Fishing* menjadi bagian terintegrasi dari upaya mencapai keamanan pangan dan perlindungan ekosistem. Kerja sama perikanan juga merupakan salah satu amanat penting yang disampaikan para pemimpin ASEAN dan Republik Korea dalam ASEAN-ROK *Commemorative Summit* bulan Desember 2014 lalu di Busan, Republik Korea", lanjutnya.

Di bidang ekonomi, peningkatan UKM menjadi salah satu pembahasan signifikan dalam Pertemuan tersebut. "Pengembangan sektor UKM dinilai penting guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang positif," seperti disampaikan Ketua SOM ROK, Deputy *Minister for Political Affairs* Kemlu ROK, H.E. Kim Hong-Kyun. "Oleh karena itu, kehadiran ASEAN-ROK *Business Council,* yang baru dibentuk bulan Desember 2014 lalu di Busan, diharapkan tidak hanya menjadi wadah komunikasi antar UKM, namun juga antara UKM dengan perusahaan-perusahaan mapan yang ada," tambahnya.

KEMLU.GO.ID

Para pejabat tinggi negara-negara ASEAN dan Republik Korea, berfoto bersama dalam kegiatan Dialog ASEAN- Republik Korea ke 19 di Bali 28-29 Mei 2015.

Selain kedua isu di atas, pertemuan juga membahas berbagai isu politik dan keamanan. Termasuk, perkembangan isu Semenanjung Korea terutama pasca Korea Utara dipimpin oleh Kim Jong-un sejak akhir tahun 2011. Bagi ROK, meskipun ada perkembangan positif, namun permasalahan nuklir Korea Utara masih memprihatinkan. ROK berharap agar ASEAN dapat memberikan dukungan dengan menyampaikan pesan yang jelas dan konsisten kepada Korea Utara guna mendorong proses penyelesaian isu ini.

Pada kesempatan yang sama, ROK juga menyampaikan dukungannya atas perlu dipertahankannya Sentralitas ASEAN dalam berbagai mekanisme ASEAN. ROK berpandangan bahwa kepemimpinan ASEAN telah memberikan kontribusi positif bagi stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Selain mengkaji ulang kerja sama kemitraan ASEAN-ROK yang telah berjalan selama ini, pertemuan juga membahas beberapa isu strategis lainnya, seperti perkembangan di Timur Tengah dan ISIL (*Islamic State of Iraq and the Levant)*, konflik di Laut Tiongkok Selatan, kejahatan lintas negara, perubahan iklim, penanganan bencana alam maupun penanganan penyakit menular.

Delegasi RI pada 19th ASEAN-Dialogue tahun 2015 dipimpin oleh Dirjen Kerja Sama ASEAN dan didampingi oleh direktur Mitra Wicara dan Antar Kawasan serta pejabat/staf dari Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kemlu RI; Kementerian Perdagangan RI; Kementerian Kesehatan RI; dan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN (PTRI ASEAN). Pelaksanaan ASEAN-ROK Dialogue tahun ini merupakan yang terakhir bagi Indonesia selaku negara kordinator kerja sama kemitraan ASEAN-ROK sejak tahun 2012.●

DIT. MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

KOMITMEN ASEAN LINDUNGI PEREMPUAN DAN ANAK

ONE-EUROPE.COM

Kasus kekerasan terhadap anak dan terha–dap perempuan di Indonesia masih terbilang tinggi. Simak saja. Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan menyebutkan bahwa sepanjang 2014 lalu ada sebanyak 293.220 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani di Indonesia. Sedangkan kekerasan terhadap anak, data KPAI mencatatkan sebesar 3.512 kasus dilaporkan pada tahun 2014.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu isu yang tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, melainkan juga menjadi permasalahan regional dan global. Di tingkat regional, ASEAN telah memiliki *Declaration on the Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children in ASEAN (DEVAW/VAC)* yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-23 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Deklarasi ini sekaligus menjadi penegasan kembali komitmen ASEAN dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sebelumnya telah diwujudkan dalam *Declaration on the Elimination of Violence Against Women in the ASEAN Region* yang diadopsi pada ASEAN *Ministerial Meeting (AMM)* ke-37 tahun 2004 di Jakarta.

Guna menciptakan ASEAN yang aman dan melindungi hak masya–rakatnya, ASEAN terus mengupayakan kemajuan kerjasama regio–nal dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Selain deklarasi tersebut, guna mewujudkan ASEAN sebagai *"a caring and sharing community"* yang berorientasi dan berpusat pada masyarakatnya, ASEAN telah

ART SKF

mencatatkan beberapa perkembangan dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perkembangan pertama, dicapai pada Pertemuan ke-10 *ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC),* di Jakarta bulan Februari 2015 lalu.

Badan sektoral ASEAN yang memiliki mandat untuk memajukan dan melindungi hak perempuan dan anak ini (ACWC) telah mengadopsi *Gender Sensitive Guideline for Handling Women Victims of Trafficking in Persons*. *Guideline* tersebut dikembangkan dari hasil *Workshop on the Promotion of Access to Justice for Women Victims of VAW Trafficking Cases* yang diselenggarakan di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, pada 3-5 Februari 2014.

Guideline ini telah disirkulasikan sebelumnya pada Pertemuan ACWC ke-8 dan Pertemuan ACWC ke-9 tahun 2014 oleh Brunei Darussalam sebagai negara koordinator. *Guideline* ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para penegak hukum, pekerja sosial, petugas kesehatan, penyedia jasa, LSM, dan pihak terkait lainnya yang menangani kasus perdagangan manusia, untuk mengembangkan *common guidelines and gender sensitive measures* dalam menangani korban trafficking perempuan (termasuk anak perempuan); meningkatkan akses keadilan bagi korban trafficking perempuan; dan berkontribusi meningkatkan praktek penanganan korban *trafficking* perempuan dalam hal pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Selain itu, *Guideline* ini juga memasukkan situasi khusus seperti saat terjadi bencana alam dan konflik serta tindakan preventif dan upaya membangun *awareness*. *Guideline* ini tentunya diharapkan dapat menjawab salah satu tantangan dalam memberantas kekerasan terhadap wanita di Asia Tenggara seperti yang disampaikan *UN Women,* yaitu kurangnya *gender-sensitivity* dan *gender-responsiveness* dalam penegakan hukum di Asia Tenggara.

Kedua, guna mengimplementasikan DEVAW/VAC, ASEAN juga tengah menyusun draft *ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination of Violence Against Women (RPA on EVAW)* dan *ASEAN Regional Plan of Actions on Elimination of Violence Against Children (RPA on EVAC)* di bawah koordinasi Thailand. Pada Pertemuan ACWC ke-10, Thailand mempresentasikan *zero draft of the ASEAN RPA on EVAW*. Thailand akan melakukan serangkaian *Workshops* bersama dengan tim *ACWC-ASEAN Commitee on Women (ACW) Working Group,* yaitu Filipina, Malaysia, dan Vietnam dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain *UN Women.*

Sementara itu, untuk *RPA on EVAC,* penyusunan *draft RPA on EVAC* dilakukan dalam ACWC-SOMSWD

(Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development) Working Group (AWG), ad-hoc drafting group yang beranggotakan Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand (koordinator), dengan dukungan UNICEF EAPRO dan *SAVE the Children*.

Finalisasi draft RPA on EVAW dan RPA on EVAC direncanakan akan dilakukan saat ACWC *Special Meeting* di Brunei Darussalam pada bulan September 2015. Pada *first draft* yang dihasilkan setelah *Consultation ACWC-ACW Working Group and Consultation of Stakeholders* di Bangkok, Thailand pada April 2015 lalu untuk melakukan review terhadap *zero draft, t*erdapat 8 rencana aksi, yaitu *prevention; protection and support services for victim and survivors; legal framework, prosecution and justice system; capacity building; research data collection; management, coordination, monitoring and evaluation; partnership and collaboration; serta review and communication*.

Ketiga, pembentukan *Network of Social Services Agency (NOSSA)* untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak di ASEAN. NOSSA merupakan salah satu proyek ACWC yang tercantum dalam ACWC *Work Plan (*2012-2016) dengan Singapura sebagai negara koordinator serta didukung oleh *U.S. PROGRESS*. Proses pembentukan NOSSA saat ini telah memasuki fase III, yaitu fase *Reporting Findings* yang ditargetkan berlangsung hingga Mei 2015.

Peresmian NOSSA direncanakan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2015. Hasil *in-country consultations* yang disampaikan pada pertemuan ACWC ke-10, disampaikan bahwa NOSSA dapat dijadikan wadah untuk *Information Sharing; Research; Networking and Referrals; Capacity Development; Advocacy; serta Promotion and Funding*. Adapun hingga akhir Februari 2015, telah terdapat 33 *Social Service Agencies* (SSA) dari seluruh negara ASEAN yang menjadi anggota NOSSA.

Selain ketiga hal tersebut, Indonesia juga menjadi negara koordinator untuk tiga kegiatan, yaitu *Consultative Meeting on Cultural Religious Practices Impacting the Rights of Children; Setting Performance Standard on ASEAN Integrative Child Protection System: A Baseline Study; dan Strengthening Economic Rights of Women with Regard to Feminization of Poverty Particularly Women's Rights to Land and Property. ASEAN Consultation on Cultural and Religious Practices Impacting the Rights of Children* telah diselenggarakan dengan dukungan *UNICEF* pada 18-20 November 2014 di Jakarta. Sementara itu, tahap pertama *Study on Women's Economic Rights to Land and Property in ASEAN Countries berupa expert meeting* telah diselenggarakan pada 10-11 Juni 2013 di Jakarta dengan dukungan *UN Women*. Untuk kegiatan *Setting Performance Standards on Integrative Child Protection System,* Indonesia telah mengumpulkan *concept note* ke ASEAN *Secretariat* dan saat ini sudah memasuki tahap *situation analysis*.

Tahun ini, ACWC berencana menyusun *ACWC Work Plan 2016-2020* dengan menjadikan *RAP on EVAW and EVAC* yang tengah dikembangkan sebagai salah satu acuan. ASEAN juga tengah menyusun *ASEAN Community Vision 2025*. Kedua hal tersebut tentu dapat menjadi momentum yang tepat untuk memasukkan agenda penghapusan kekerasan terhadap anak dan perempuan guna semakin meningkatkan kerja sama terkait isu tersebut.●

DIT. KERJA SAMA FUNGSIONAL ASEAN

PAYSONTULANE.COM

INDONESIA-AUSTRALIA

BNPB.GO.ID

Para peserta Workshop *Indonesia-Australia Rapid Disaster Response*, di Bali 10-11 Juni 2015.

Dampak dan kerusakan akibat bencana alam terbukti dapat meluas melintasi batas negara. Sebut saja Tsunami yang terjadi Samudera Hindia tahun 2004. Bencana ini menghancurkan dae–rah-daerah di beberapa negara yang berbatasan pada Samudera Hindia, seperti Indonesia, India, dan Thailand. Contoh lainnya, gempa bumi Nepal tahun 2015 yang berdampak tak hanya di Nepal, tapi juga di negara tetangganya seperti India dan Bangladesh.

Berdasarkan alasan inilah Indonesia dan Australia maupun negara-negara *East Asia Summit* (EAS) lainnya seperti Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, Tiongkok, India, Jepang, Korea, Selandia Baru, Rusia dan Amerika Serikat, menyadari adanya kebutuhan akan sebuah pendekatan yang terencana dan terkoordinasi dalam lingkup regional, guna mengelola bantuan internasional ketika bencana datang.

Berawal dari kesadaran itu, Indonesia dan Australia sepakat untuk meningkatkan kerja sama regional dalam hal respon cepat terhadap bencana, melalui kerangka *East Asia Summit* (EAS). Kerja sama itu diwujudkan melalui peluncuran *East Asia Summit Rapid Disaster Response Toolkit (EAS Toolkit)* pada tanggal 10 Juni 2015 di Bali, bertepatan dengan penyelenggaraan *EAS Indonesia-Australia Rapid Disaster Response Workshop* ketiga.

Penerapan EAS Toolkit diharapkan akan berkontribusi dalam upaya persiapkan dan memastikan respon bencana yang cepat dan efektif.

EAS Toolkit merupakan salah satu bentuk hasil kolaborasi dan kerja sama EAS di bidang penanggula–ngan bencana yang berawal dari *Indonesia-Australia East Asia Summit Disaster Management Initiative* pada tahun 2011. Sejak itu, Indonesia dan Australia secara rutin menyelenggarakan *workshop* untuk pembahasan *EAS Toolkit*. *EAS Indonesia-Australia Rapid Disaster Response Workshop* diselenggarakan pertama kali di Darwin, Australia pada tahun 2013, kedua di Bali pada tahun 2014, dan ketiga pada tanggal 10-11 Juni 2015 di Bali. Workshop juga bekerja sama dengan WHO untuk mempromosikan implementasi regional dari pedoman WHO untuk *Foreign Medical Teams* (FMT).

Indonesia dan Australia menyadari bahwa *EAS Toolkit* tidak mungkin dapat memberikan semua jawaban mengenai respon bencana di kawasan EAS. Namun diharapkan *EAS Toolkit* ini dapat menjadi referensi bagi negara-negara EAS dalam merespon bencana secara cepat di kawasan, serta membantu

LUNCURKAN EAS TOOLKIT

para pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif dalam upaya penanggulangan bencana.

EAS Toolkit berisi kumpulan praktik terbaik dan informasi kunci relevan yang disajikan dalam format sederhana. Fondasi dari *EAS Toolkit* adalah A*SEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response (AADMER)* dan *ASEAN Standard Operating Procedure for Regional Standby Arrangements and Coordination of Joint Disater Relief and Emergency Response Operations* (SASOP) yang telah dimiliki ASEAN. *EAS Toolkit* bersifat *non-legally binding* dan tidak bermaksud menggantikan AADMER dan SASOP.

EAS Toolkit diharapkan dapat dieksplorasi dan dipraktikkan di seluruh wilayah. Karena itu, diperlukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku *focal point* dalam bidang penanggulangan bencana di Indonesia perlu mendiseminasikan *EAS Toolkit* kepada pihak-pihak terkait di tingkat nasional.

Prestasi Indonesia yang telah meluncurkan *EAS Toolkit* bersama Australia semakin membuktikan langkah dan eksistensi Indonesia sebagai negara yang mempunyai kemampuan cukup tinggi dalam bidang penanggulangan bencana. Ini, sekaligus menyatakan kembali komitmen dan konsistensi Indonesia dalam meningkatkan ketahanan bencana di kawasan. Kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional tentang penanggulangan bencana merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk membina budaya keselamatan, dan membangun ketahanan bangsa serta kawasan, dengan melakukan konsolidasi perbaikan kerja sama penanggulangan bencana yang cepat di seluruh wilayah. Kehadiran Indonesia di forum internasional ini juga secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif.

Kesadaran akan pentingnya upaya pengurangan risiko bencana, serta rentannya kawasan Asia Tenggara terhadap bencana, juga telah mendorong Indonesia untuk mengadopsi *Sendai Framework* pada *Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction* di Sendai, Jepang, bulan Maret 2015 lalu. Salah satu bidang prioritas Sendai *Framework* adalah meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk dapat melakukan respon yang efektif. Terkait itu, pemerintah Indonesia telah merumuskan *road map* untuk *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction Implementation* selama 15 tahun ke depan.

Selain itu, Indonesia telah mengembangkan *Disaster Risk Reduction Tsunami Master Plan* pada tahun 2012, dan pada tahun 2015 Indonesia berencana mengembangkan *Master Plan* untuk 5 bencana yaitu banjir, tanah longsor, banjir bandang, letusan gunung berapi dan kekeringan. Setiap *Master Plan* akan berisikan mengenai peningkatan kesiapsiagaan bencana sebagai salah satu program yang diprioritaskan. Untuk memastikan bahwa *Master Plan* tersebut dapat berjalan secara efektif, Indonesia telah melakukan beberapa latihan rutin. Seperti, T*able Top Exercise* dan *Command Post Exercise*. *Mentawai Megathrust Disaster Relief Exercise* 2013-2014 merupakan contoh dari mekanisme yang dilakukan Indonesia untuk meninjau kebijakan, rencana, dan prosedur mulai dari tingkat lokal, nasional dan regional.

Penerapan *EAS Toolkit* diharapkan akan memberikan kontribusi pada penguatan pendekatan regional yang terkoordinasi untuk memastikan respon bencana yang cepat dan efektif dalam situasi yang melampaui kapasitas ketahanan nasional. Selain itu, *Toolkit* juga menyediakan peluang berharga bagi negara-negara EAS untuk bersama-sama menerapkan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*. Hal ini dapat memperkuat kerja sama internasional dan kemitraan global.●

DIT. MITRA WICARA ANTAR KAWASAN

EAS Toolkit
berisi kumpulan praktik terbaik dan informasi kunci relevan yang disajikan dalam format sederhana. Terdiri dari 3 tools:

1. **National Focal Point Table**
berisi informansi kontak kunci dari pejabat masing-masing negara EAS yang bertanggung jawab untuk mengatur penawaran dan permintaan bantuan bencana internasional.

2. **Guidance for Rapid Disaster Response**
menguraikan isu-isu kunci dan pertimbangan untuk membantu para pengambil keputusan baik dari negara terdampak bencana, negara pengirim bantuan, maupun negara transit yang dipersiapkan untuk merespon bencana

3. **EAS Country Disaster Rapid Response Arrangements**
berisi rincian pengaturan respon cepat terhadap bencana untuk setiap negara EAS

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

KOMANDAN PANGKALAN AL TARAKAN
KOLONEL LAUT (P) ARIES CAHYONO S.E

"MASYARAKAT TARAKAN CUKUP DEWASA HADAPI PAHAM RADIKAL"

Sebagai provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Malaysia dan Filipina), Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki tantangan dan potensi ancaman tersendiri terkait dengan dinamika di kawasan. Salah satu diantaranya adalah masuknya paham-paham radikal dari luar Indonesia ke dalam negeri.

Terkait pemberlakuan Masyarakat ASEAN, aparat keamanan, termasuk TNI Angkatan Laut berperan besar dalam menjaga stabilitas dan keamanan guna mendukung peningkatan peluang yang bisa diperoleh dari pelaksanaan Masyarakat ASEAN nanti.

Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan TNI AL, tim Majalah Masyarakat ASEAN melakukan wawancara dengan Komandan Pangkalan AL Tarakan, Kolonel Laut Aries Cahyono. Berikut petikannya.

Bagaimana upaya TNI AL dalam menangani isu keamanan non tradisional seperti terorisme, penyebaran paham radikal, kejahatan lintas batas, penyelundupan, peredaran narkoba?

TNI AL telah menugaskan Lanal Tarakan yang membawahi Pos AL di Nunukan, Maratua, Derawan, dan Pulau Bunyu untuk menyelenggarakan Operasi Perisai Sakti guna meminimalisir potensi arus masuk ancaman tersebut. Patroli rutin dan gelar deteksi dini melalui penginderaan jarak jauh juga terus dilakukan.

Lanal Tarakan juga senantiasa berkoordinasi dengan Kepolisian, Bea Cukai, dan unsur BAIS TNI terkait dengan *sharing* informasi mengenai potensi aktivitas kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan, narkoba, terorisme, dan lainnya. Memang dengan kondisi sarana dan logistik yang ada, ini menjadi tantangan tersendiri. Sehingga dukungan pemangku kepentingan di pusat sangatlah penting, termasuk bantuan dalam menangani isu-isu tersebut di tingkat ASEAN.

Bagaimana koordinasi antara AL dengan jajaran SKPD terkait isu keamanan?

Secara umum kondisi keamanan di Tarakan dan Kaltara relatif stabil dan terkendali. Tidak ada isu keamanan di sektor maritim yang signifikan. Apabila ada, dan sudah pernah terjadi dulu namun sangat jarang terjadi, adalah berupa perompakan yang mengganggu aktivitas perdagangan. Lanal Tarakan senantiasa berkoordinasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menangani isu keamanan.

Bagaimana dengan upaya pencegahan penyebaran paham radikal, penyelundupan barang, serta narkoba oleh TKI yang keluar masuk di kawasan Kaltara?

Sebagai ilustrasi beberapa waktu lalu kerja sama antar aparat keamanan telah berhasil mencegah penyelundupan barang di Nunukan. Memang faktor geografis menjadi tantangan tersendiri. Kerja sama antara Lanal di Nunukan dengan Imigrasi dan Bea Cukai di Sebatik sudah komprehensif. Semua pihak menyadari perannya untuk menjadi filter arus manusia. Memang masih butuh proses penyempurnaan.

Patroli kapal secara rutin juga memeriksa setiap kapal yang lewat. Selain itu di Tarakan ada badan pengawasan orang asing yang terdiri dari aparat terkait, Kominda, dan unsur intelijen Imigrasi serta Bea Cukai.

Terkait dengan penyebaran paham radikal hingga saat ini belum ditemui kasus TKI yang pulang membawa paham radikal. Namun mayoritas masyarakat Kaltara sudah bisa memfilter paham seperti itu.

Upaya *counter terrorism* di masyarakat?

Walau *main core* TNI AL berada di laut namun tetap berkontribusi melalui forum komunikasi intelijen daerah (Kominda) dan *pool info* ke BAIS (pusat) untuk pengolahan upaya pencegahan potensi terorisme. Lanal Tarakan juga melaksanakan penyuluhan, pemantauan, pembinaan, dan pendataan.

Masyarakatnya sendiri bagaimana? Apakah mudah menerima paham radikal?

Masyarakat di sini sudah cukup dewasa. Organisasi berbasis kea–gamaan di sini juga dewasa. Apabila ada kejanggalan langsung melapor ke Kominda dan unit kesbangpol di pemda. Sehingga dapat cepat ditindaklanjuti apabila di luar normatif untuk dibina.

Mayoritas modus operasi peredaran narkoba adalah menggunakan kapal-kapal kecil. Bagaimana dengan kerja sama penanganan narkoba?

Banyaknya sungai dan anak sungai yang bermuara langsung ke laut menjadi tantangan sendiri. Rata-rata daerah hantaran sungai tersebut juga belum berpenghuni. Oleh karenanya salah satu upaya pemberantasan narkoba dilakukan melalui kerja sama intensif dengan aparat terkait. Keterbatasan SDM dan sarana dalam meng-*cover* daerah yang harus diawasi diatasi dengan *sharing* informasi yang intensif sehingga setiap pihak dapat cepat dan langsung menindaklanjuti. Guna membantu optimalisasi di laut aparat juga memaksimalkan upaya pencegahan dan penangkapan di darat.

Apakah ada upaya pembinaan terkait narkoba yang dilakukan seperti dalam penanganan terorisme?

Ada. Melalui Bindesir, pembinaan masyarakat desa pesisir. Melalui program tersebut disampaikan sosialisasi bahaya narkoba. Selain itu masyarakat juga dihimbau untuk segera melapor apabila menemui hal yang mencurigakan atau kapal yang tidak dikenal di laut.

Upaya selain pembinaan?

Penggalangan informasi dari masyarakat. Tanpa peran serta maksimal dari masyarakat maka upaya yang dilakukan tidak akan signifikan.

Salah satu manfaat ASEAN di pilar Polkam yang sudah diakui oleh du–nia internasional adalah pencegahan konflik secara terbuka di antara negara anggotanya. Apakah hal tersebut juga membantu dalam mencegah potensi konflik di perbatasan dengan Malaysia pada tataran operasional?

Apabila Masyarakat ASEAN resmi berlaku, tugas pokok Angkatan Laut adalah mengamankan jalur ekonomi. Saat ini ada 3 – 5 KRI yang beroperasi secara rutin di perbatasan, khususnya Blok Ambalat. Masyarakat ASEAN, khususnya Masyarakat Ekonomia ASEAN (MEA), dapat membawa potensi kerja sama yang bagus karena memberikan satu tujuan bersama dengan kolega di negara ASEAN, yakni mengamankan kegiatan ekonomi.

Terkait dengan potensi gesekan dapat dieliminir apabila masing-masing pihak berpegang teguh pada dokumen yang ada. Sebagai informasi, Lanal Tarakan telah mengusulkan kepada Mabes di pusat untuk dilaksanakan latihan bersama di perbatasan. Penting untuk latihan dan patroli bersama di perbatasan untuk dapat mengamankan kegiatan ekonomi.

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Bagaimana kerja sama dengan kolega dari Malaysia dan Filipina terkait dengan pengamanan potensi ekonomi di laut di daerah perbatasan?

Untuk sementara komunikasi yang baik dan intens masih dari Filipina, Malaysia belum. Beberapa waktu lalui telah dilakukan operasi bersama antara AL Indonesia dengan AL Filipina terkait dengan 13 orang awak kapal Filipina yang terdampar di Pulau Bunyu. Filipina juga telah menempatkan satu orang l*iason officer* di sana guna memudahkan komunikasi. Untuk Kepolisian kerja sama khusus dengan Malaysia sudah ada.

Apakah ada rencana untuk kerja sama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina?

Sudah ada usulan untuk saling menempatkan petugas masing-masing, namun saat ini belum ada arahan lebih lanjut. Di tingkat operasional komunikasi sudah terjalin dengan baik. apabila ada pihak yang melakukan patroli perbatasan maka negara tetangganya selalu dihubungi.

Sebagai aparat yang dalam kesehariannya berinteraksi langsung dengan seluruh lapisan masyarakat di Kaltara, apakah isu kerja sama ASEAN telah dikenal di masyarakat?

Masyarakat Kaltara belum begitu familiar dengan isu kerja sama ASEAN. Kalau pun ada yang pernah mendengar dan memahami hanya di level tertentu. Masyarakat masih disibukan dengan isu-isu ekonomi lokal, sehingga MEA belum jadi perhatian. Untuk di tingkat pemerintah daerah, khususnya Walikota, pada tiap kesempatan selalu mengumandangkan kesiapan daerah dalam menyambut MEA. Akan tetapi harus diakui tingkat koordinasi terkait MEA masih belum optimal.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

KALTIM.TRIBUNNEWS.COM

PEJABAT GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

TRIYONO BUDI SASONGKO

"KALTARA HARUS PERCAYA DIRI"

Sebagai provinsi termuda dan salah satu daerah terdepan yang berbatasan langsung dengan dua negara anggota ASEAN (Malaysia dan Filipina), Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki potensi dan tantangan tersendiri dalam mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat ASEAN 2015. Isu-isu Politik-Keamanan (Polkam) mendapatkan porsi perhatian yang relatif lebih besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Sebut saja pergerakan arus tenaga kerja migran, penyelundupan barang dan narkoba, serta pengelolaan kawasan perbatasan merupakan isu yang relatif nihil di provinsi lainnya.

Apa saja potensi peluang dan tantangan Kaltara dalam menghadapi Masyarakat ASEAN. Serta bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menanganinya. Tim Majalah Masyarakat ASEAN pada 28 Mei lalu telah mewawancarai Triyono Budi Sasongko, Pejabat Gubernur Kalimantan Utara. Wawancara bertempat di *VIP Room* Bandara Juwata, Tarakan, di sela-sela waktu transit mantan Bupati Pasuruan ini menunggu pesawat lanjutan ke Tanjung Selor sepulangnya dari Blusukan di Nunukan dan Malinau. Berikut petikannya:

Apa peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Kalimantan Utara untuk menghadapi Masyarakat ASEAN?

Peluang dan tantangan selalu ada, terlebih lagi Kaltara berbatasan langsung dengan negara tetangga, yakni Malaysia. Tentu saja persoalan-persoalan di perbatasan menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi Masyarakat ASEAN nanti. yang harus dihadapi bersama. Salah satu persoalan utama yang sering menjadi penyebab konflik adalah masih ada beberapa titik yang masih belum jelas batas wilayahnya. Saat ini masih ada 5 *outstanding boundaries problem*,yakni ada 5 titik yang masih belum jelas batas wilayahnya. Hal ini perlu dihadapi bersama, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, diperlukan usaha yang berbeda dengan provinsi lain untuk dapat menghadapi masalah ini.

Usaha apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah?

Setidaknya usaha yang dilakukan harus dilihat dari dua dimensi. Pertama adalah dimensi batas wilayah. Dalam dimensi ini ada beberapa hal yang harus lakukan. Pemerintah pusat harus segera menyelesaikan persoalan-persoalan mengenai batas wilayah yang belum memiliki kejelasan. Hal ini bisa dilakukan melalui perundingan secara bilateral dan peningkatan peran diplomasi RI.

Meningkatkan pelayanan *exit entry point* (titik lintasan penghubung sebagai pintu keluar masuk barang dan orang antar negara). Sejauh ini, kita hanya punya satu Pos Lintas Batas Laut (PLBL) yang berfungsi sebagai *exit entry point*, yakni di Limhijung. PLBL ini tidak bisa bekerja secara optimal, terutama karena sarana dan prasarana pos PLBL ini tidak bisa mengakomodasi arus keluar masuk barang dan orang dari dan ke Malaysia yang terbilang cukup tinggi setiap hari.

Meningkatkan pelayanan *Custom,*

Immigration, Quarantine, Security (CIQS) yang selama ini masih belum terpadu, belum satu pintu. Saya kira hal ini harus dibuatkan payung hukum, untuk dapat mengintegrasikan keempat hal tersebut menjadi satu pintu.

Meskipun hal diatas berada dibawah kewenangan pemerintah pusat, peran pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov Kaltara juga sangat signifikan. Pemprov harus mendukung secara penuh upaya-upaya pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian-penyelesaian batas wilayah. Disamping itu, Pemprov juga memperkuat dari aspek ekonomi dan sosial budaya. Keterpaduan dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan.

Kedua adalah dimensi kawasan. Pemerintah wajib melakukan berbagai upaya untuk mempersiapkan kawasan terdepan dalam menghadapi Masyarakat ASEAN. Usia Kaltara yang masih dua ini merupakan potensi tersendiri karena provinsi ini tidak memiliki beban sejarah pemerintahan yang berat.

Selain itu, di usia yang masih sangat muda ini, Kaltara sudah menunjukkan prestasi yang cukup bagus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan. Tahun ini Kaltara mendapat berbagai penghargaan seperti terselenggaranya rekruitmen CPNS terbersih dan peringkat 3 tingkat nasional atas pelaksanaan Ujian Nasional dengan integritas dan kejujuran.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik merupakan upaya yang terpenting dalam dimensi ini. Hal ini termasuk memberikan pelayanan terbaik untuk para pemangku kepentingan melalui kemitraan-kemitraan yang baik dengan setiap pemangku kepentingan. Lembaga keuangan pada pemerintahan juga harus diperkuat untuk mendukung kinerja terbaik bagi pemerintahan. Menyiapkan SDM yang baik melalui peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Kaltara.

Yang paling utama adalah adanya komitmen pemerintah pusat yang tinggi dengan meletakkan isu perbatasan menjadi prioritas. Hal ini sesuai dengan nawacita dan telah dituangkan dalam RPJMN.

BERITABORNEO.CO.ID

NEWSSOURCEGY.COM

Menyoal kesiapan masyarakat Kaltara menghadapi Masyarakat ASEAN, bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah setempat?

Pemerintah harus selalu aktif menyosialisasikan Masyarakat ASEAN. Bagaimanapun juga negara harus hadir dalam persoalan apapun yang dihadapi masyarakat. Jajaran pemerintah harus terus memberikan motivasi agar masyarakat mau bersama-sama memperbaiki, karena ini juga untuk kebaikan mereka sendiri. Meskipun masih banyak keterbatasan, saya optimis apabila sosialisasi ini dilakukan dengan baik, masyarakat akan siap menghadapi Masyarakat ASEAN. Kita harus percaya diri. Untuk itu, Pemprov selalu berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan dan komponen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, kader-kader PKK, termasuk juga dengan media setempat.

Apakah momen Pilkada untuk pertama kali yang sebentar lagi akan dihadapi oleh masyarakat membuat Masyarakat sedikit teralihkan terhadap isu Masyarakat ASEAN?

Tidak. Justru momen Pilkada ini bisa menjadi momentum yang cukup besar untuk mensosialisasikan Masyarakat ASEAN. Pilkada ini dapat digunakan untuk mencerdaskan rakyat, memberikan informasi yang benar, dan menunjukkan kepada mereka bahwa pemerintah telah benar-benar menerapkan asas-asas demokrasi yang baik dan bersih. Kesuksesan dalam melaksanakan pemilu ini dapat menjadi penanda bahwa masyarakat telah siap untuk memasuki Masyarakat ASEAN. Oleh karenanya, pada tanggal 31 Desember nanti, masyarakat tidak hanya merayakan pesta kembang api untuk memasuki tahun baru saja, tetapi juga pesta memasuki persaingan yang ketat antar negara di kawasan Asia Tenggara.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI KANTOR BEA CUKAI TARAKAN

MUHAMMAD AGUS SETYA BUDI

MASYARAKAT ASEAN SUDAH BERLANGSUNG

KITA HANYA PERLU MENJALANINYA

Apakah ASEAN cukup dikenal di Kota Tarakan?

Secara umum, masyarakat Kota Tarakan sedikit banyak memahami bahwa Malaysia dan Indonesia sama-sama merupakan negara anggota masyarakat ASEAN. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan berada dekat dengan perbatasan negara Indonesia-Malaysia, sehingga banyak aktivitas keluar masuk barang serta pergerakan warga dari dan ke Malaysia.

Bagaimana dengan Masyarakat ASEAN? Apakah masyarakat Kota Tarakan cukup familiar dengan isu tersebut?

Saya melihat bahwa masyarakat setempat masih sangat terfokus pada isu-isu kedaerahan, sehingga persoalan mengenai Masyarakat ASEAN belum begitu familiar. Terlebih lagi, selama ini masyarakat juga sudah banyak melakukan impor-ekspor produk-produk dari Malaysia namun yang sifatnya konsumtif. Sehingga, manfaat nyata Masyarakat ASEAN seperti tidak terasa. Namun, dalam kenyataanya Masyarakat ASEAN tidak hanya terfokus pada konsumsi barang saja, tetapi juga peningkatan industri dan jasa. Jadi, hanya sebagian masyarakat saja yang benar-benar memahami.

Melihat fakta tersebut, upaya apa yang dilakukan oleh Bea Cukai bersama dengan Pemda setempat?

Dari sisi internal Bea Cukai, kami senantiasa menguatkan tugas pokok dan fungsi bea cukai, khususnya yang terkait dengan Masyarakat ASEAN. Salah satu yang kami lakukan adalah melalui Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan kepada para pegawai (P2KP). Hal ini dilakukan karena Masyarakat ASEAN sudah akan berlangsung, oleh karenanya, setiap pegawai di Bea Cukai harus mengetahui tupoksi dengan baik, terutama yang terkait arus keluar masuk barang ke dan dari wilayah Indonesia khususnya kota Tarakan. Kami juga menjalin hubungan yang baik dengan Pemkot Tarakan dan pemangku kepentingan terkait melalui kehumasan, melakukan rapat koordinasi dan menghadiri berbagai pelatihan seperti workshop maupun seminar terkait Masyarakat ASEAN, serta selalu aktif menyampaikan masukan dan pendapat pada setiap pertemuan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait Masyarakat ASEAN.

Apakah sudah pernah ada kegiatan sosialisasi terpadu di Kota Tarakan, terkait Masyarakat ASEAN dengan mengundang semua pemangku kepentingan?

Sudah. Beberapa waktu lalu tepatnya tgl 14-15 April 2015 bertempat di Hotel Swiss-Bell Tarakan, diselenggarakan kegiatan terpadu berupa Rapat Kordinasi Perdagangan Perbatasan dalam rangka Pertemuan *Joint Trade and Investment Committe* (JITC) Indonesia–Malaysia ke-2 yang menghadirkan Direktur Kerja Sama ASEAN Direktorat Jenderal Kerja Sama Internasional Kementerian Perdagangan, Atase Perdagangan Malaysia, Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP, Walikota Tarakan dan semua pemangku kepentingan terkait guna membahas isu perdagangan lintas batas. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya persiapan menghadapi Masyarakat ASEAN. Selain itu, kami juga selalu rutin melakukan koordinasi dengan SKPD dan membentuk badan-badan untuk mendukung pemerintah. Salah satunya kami tergabung dalam Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang beranggotakan intelijen dari Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal), Lanud, Kodim, Batalyon 613 Raja Alam, Imigrasi, Kejaksaan, BAIS, BIN, Kepolisian, Satpol PP, Pemkot, Bea Cukai, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk tokoh masyarakat.

Terkait isu narkoba yang saat ini hangat dibicarakan publik, bagaimana pihak pemangku kepentingan melalui

Kominda berkoordinasi aktif untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba di wilayah perbatasan?

Melalui Kominda, kami menjalin komunikasi dan koordinasi rutin, yakni 2 kali dalam sebulan. Kominda ini langsung di komando oleh Walikota Tarakan. Kami juga melakukan patroli bersama. Begitu panjangnya garis pantai yang ada di perbatasan ini memang berpotensi sebagai jalur penyelendupan narkoba. Selain itu, pelatihan-pelatihan mengenai teknik-teknik pencegahan penyelundupan dan pengetahuan bentuk-bentuk modifikasi Narkoba, *Precusor* dan Psikotropika (NPP) juga sering kami lakukan sehingga setiap anggota familiar dengan isu narkoba. Bea Cukai memiliki Unit Khusus *Customs Narcotic Team (CNT) , Customs Enforcement Team (CET), Customs Tactical Units (CTU)* dan Satuan Anjing Pelacak K-9 yang bertugas khusus untuk pengawasan dan pencegahan peredaran dan penyeludupan NPP. Saya rasa kegiatan yang kami lakukan sudah cukup efektif. Terbukti, sudah banyak kasus penyelundupan Narkoba yang berhasil kami gagalkan. Forum Kominda ini juga menjadikan setiap anggotanya bersih dari kerja sama ilegal untuk membantu penyelundupan narkoba.

Apakah ada upaya lain yang dilakukan untuk membuat masyarakat paham mengenai isu narkoba?

Ya. Upaya yang dilakukan tidak hanya yang bersifat teknis, tetapi juga yang berupa pembinaan. Yang pertama, kami selalu berkomunikasi dengan masyarakat. Pembelajaran yang dilakukan kepada masyarakat harus bersinergi dengan pemerintah. Oleh karena itu, pembinaan yang dilakukan harus sesuai. Beberapa yang kami lakukan adalah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi seperti *Custom goes to School, Custom goes to Campus, Custom goes to Army*, dan *Custom on the Street* serta *Customs Visit to Customers* yang memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang tugas pokok dan fungsi bea cukai kepada masyarakat terutama yang terkait isu penanganan narkoba. Kami juga selalu berusaha melibatkan masyarakat dalam setiap kesempatan. Hal ini kami lakukan agar kerja sama dengan masyarakat dapat terjalin dengan erat.

Saat Masyarakat ASEAN sudah mulai diberlakukan nanti, arus barang antar negara ASEAN akan semakin bebas, bagaimana cara mencegah masuknya barang impor yang tidak memenuhi aturan kepabeanan?

Yang pertama yang selalu kami lakukan adalah selalu bekerja sesuai dengan tupoksi kami. Selain itu, kami selalu menindaktegas semua barang impor yang tidak sesuai dengan aturan. Dari sisi internal, kami juga memiliki unit penindakan dan pencegahan yang selalu mengawasi alur keluar masuk barang. Jika terdapat barang yang tidak sesuai dengan peraturan, langsung kami cegah.

Terkait dokumen lintas batas, ada potensi yang cukup besar menyalahgunakan dokumen tersebut. Bagaimana Bea Cukai mencegah hal tersebut?

Ada banyak aturan yang mengikat terkait penggunaaan dokumen tersebut dan itu sudah jelas tertuang dalam dokumen tersebut. Peraturan tersebut juga memuat adanya aturan tentang jumlah barang maupun uang yang dapat dibawa masuk ke Indonesia. Apabila terdapat penyalahgunaan penggunaan dokumen tersebut, kami dengan tegas mengenakan sanksi.

Bandara Juwata dipilih menjadi salah satu Point of Destination bagi masuk–nya barang impor ke Indonesia yang akan dimulai saat Masyarakat ASEAN diberlakukan nanti. Apa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan Bandara Juwata terkait isu tersebut?

Salah satu yang telah disiapkan adalah infrastruktur atau bangunan fisik bandara yang harus lebih bagus dan lebih lengkap fasilitasnya dari sebelumnya. Selain itu, sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku baik melalui peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Dirjen Bea dan Cukai, setiap bandara internasional harus memiliki Kawasan Pabean. Saat ini, kami sudah berkordinasi dengan intensif kepada pihak Pengelola Bandar Udara Khusus Kelas I Juwata untuk segera mengajukan penetapan kawasan pabean. Hal ini merupakan hal yang penting karena nantinya, kawasan pabean ini akan menjadi area yang menjadi kewenangan bea cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang masuk dari luar negeri. Pihak bandara juga harus menunjang kegiatan kepabeanan dengan teknologi seperti dengan cctv.

Terkait isu pekerja migran, upaya apa yang dilakukan oleh Bea Cukai agar tidak ada pekerja yang membawa barang secara ilegal?

Nah, sudah ada peraturan yang jelas mengenai jenis dan ukuran barang yang bisa dibawa masuk. Harus sesuai dengan kategori. Misalnya, barang pindahan atau barang bawaan. Setiap pekerja yang masuk harus melaporkan barang-barang yang mereka bawa dalam *Customs Declaration*. Tugas dari bea cukai adalah melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dibawa masuk tersebut. Apabila mereka melanggar aturan, sudah jelas kami akan memberikan sanksi.

Menyinggung isu masuknya 17 ton gula illegal dari Tawau yang sempat menjadi pemberitaan, bagaimana dengan barang?

Bea cukai berkewenangan terkait *clearance* kepabeanan barang-barang. Untuk impor sendiri, sudah ada tata niaga yang dipayungi oleh Kementerian Perdagangan. Kami juga memiliki INSW (*International Single Window*) yang memuat ketentuan Larangan dan Batasan (Lartas) atas importasi semua barang. Sebelum kami melakukan *clearance*, proses izin masuknya barang impor harus dipenuhi terlebih dahulu apakah ada Lartas yang dikenakan atas barang dimaksud. Nah, untuk kasus gula *illegal* ini, belum dapat kami tangani untuk proses *clearance* ke pabean karena importasi gula dikenakan larangan dan batasan dan dalam kasus gula ini belum mendapatkan izin. Oleh karena itu kasus ini merupakan kasus di luar bea cukai. Namun, kami selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait dalam hal ini Kepolisian.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

MENIKMATI INDAHNYA YANGON

Kota umat Budha yang punya daya tarik wisata tinggi, de–ngan Pagoda yang dianggap paling tua di dunia. Bangu-nan lama berarsitek kolonial Inggris pun masih banyak dijumpai di Yangon.

PARADISEINTHEWORLD.COM

Pagoda Shwedagon, pagoda tberlapis emas, dan yang tertua di dunia

Inilah salah satu kota paling unik di kawasan Asia Tenggara. Suasana di bekas ibukota Myanmar ini merupakan percampuran dari pengaruh Budha, kolonial Inggris, Myanmar, Tiongkok, Thailand dan India.

Di jalan-jalan kota Yangon, Anda akan sering melihat para pendeta Budha berlalu-lalang dengan jubah khas mereka. Sementara penduduk asli Yangon, menggunakan pakaian khas bernama *long yi* yang mirip sarung. Baik, laki-laki, perempuan, maupun anak-anak di sana memakai bedak tannaka, untuk melindungi wajah dari panas matahari.

Lalu, menambah keistimewaannya, di kota ini Anda bisa menyaksikan Pagoda emas yang begitu megah, yakni Pagoda Shwedagon. Berdiri megah setinggi 98 meter, stupa pagoda ini benar-benar berlapis emas. Dan, ujung paling atas pagoda ini pun terbuat dari berlian 76 karat. Yang juga istimewa, berlian ini akan terlihat berubah-ubah warnanya ketika Anda lihat dari sudut-sudut yang berbeda. Sangat mengagumkan.

Menurut legenda, Shwedagon adalah Pagoda paling suci dan tertua di dunia. Umurnya sudah mencapai 2.600 tahun. Di dalamnya, Anda bisa menemukan banyak patung Budha berukuran besar.

Pagoda Shwedagon hanyalah salah satu dari tempat keagamaan Budha lainnya di negeri seribu pagoda ini, Di Yangon, ada lagi Pagoda Botatoung Pagoda Sule, dan Pagoda Chaukhtatgyi, yang tak kalah mengagumkan.

Kota ini juga terkenal sebagai salah satu penghasil batu Ruby yang berkualitas tinggi. Beberapa kala–ngan bahkan percaya bahwa batu Ruby dari tambang Myanmar kualitasnya lebih tinggi dibanding ruby dari Madagaskar dan ruby dari Afrika.

Jika ingin berbelanja, Anda bisa pergi ke pasar Bogyoke Aung San. Pasar

WIKIMEDIA.ORG

Pagoda Sule

WIKIMEDIA.ORG

Danau Kandawgyi.

FLICKR.COM

Pasar Bogyoke Aung San

berarsitektur kolonial Inggeris ini pertama kali dibangun dan diresmikan pada tahun 1926. Namanya Scott Market, tapi kemudian berganti nama untuk menghormati pemimpin nasional Yangon Jenderal Aung San. Pasar ini dikenal sebagai tujuan wisata paling populer di Yangon karena memiliki banyak pilihan souvenir khas Myanmar, seperti beragam batu ruby, giok, vernis Myanmar, souvenir, patung, koin kuno, kaos, baju tradisional Myanmar, dan lain-lain.

Lokasi wisata lain yang bisa Anda kunjungi di Yangon, antara lain Monumen Kemerdekaan di Taman Mahabandoola, Air mancur besar di People's Park, Danau Kandawgyi dengan jembatan kayunya yang panjang, Museum Nasional, dan Zoological Garden.

Yangon, atau dikenal juga dengan nama Rangoon merupakan sebuah kota yang terletak di bagian selatan Myanmar. Kota yang terletak di tepi Sungai Yangon ini dahulunya merupakan ibu kota Myanmar sebelum akhirnya berpindah ke Nay Pyi Taw pada tahun 2006. Walaupun tak lagi menjadi ibu kota, Yangon kini tetap bertahan menjadi pusat bisnis, pusat budaya, dan pusat intelektual.

Luas wilayahnya sekitar 598,75 kilometer persegi, dengan populasi penduduk sebesar 4.504.000 jiwa. Kota ini memiliki musim hujan yang panjang antara bulan Mei hingga Oktober. Sedengkan musim kemarau terjadi di bulan November hingga April.

MIGRATIONOLOGY.COM

Suasana makan di tepi jalan ala Kota Yangon, Myanmar.

Kuliner Myanmar

Yangon menyediakan banyak jajanan yang unik dan sedap. Kuliner kota ini begitu beragam, karena dipengaruhi oleh berbagai budaya, mulai dari makanan Thailand, Tiongkok, hingga India. Jajanan makan pinggir jalannya pun menawarkan bermacam sensasi rasa.

Salah satu menu wajib di Yangon, adalah menu nasional Myanmar yaitu *mohinga*. Menu paling populer di Myanmar ini terbuat dari mie beras atau bihun, dengan kuah kaldu ikan. Bumbunya, berupa racikan jahe, bawang putih, dan serai. Lalu, ditambah irisan pisang dan telur rebus.

Menu populer lainnya adalah *laphet thoke,* yaitu salad daun teh, yang ditambah dengan irisan tomat, kol, kacang goreng, serta jahe dan bawang putih, dengan dressing berbahan minyak kacang, saus ikan dan perasan jeruk.

Adalagi, *gyin thoke*. Salad ini mirip dengan *laphet thoke,* namun bahan utamanya bukan daun teh, melainkan irisan jahe. Menu lain yang juga unik adalah *thayet chin thoke*. Salad yang satu ini sangat istimewa karena merupakan hasil fermentasi dari mangga hijau. Makanan ini juga dibumbui dengan bawang, cabai, kacang goreng, wijen dan juga minyak kacang.

Masih ada lagi roti *dosa* yang mirip roti masala dari India. *Dosa* diberi isi irisan wortel, kol, toge, kacang, dan tomat, lalu siap dilipat untuk dihidangkan bersama kuah kari.

Tertarik untuk mencicipi makanan khas Myanmar ini? Jangan ragu lagi, ayo melancong ke Yangon.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

ASIASTREETFOOD.COM

Mohinga, menu terpopuler di Myanmar

MARK WIENZ

Laphet thoke, salad daun teh khas Myanmar

MARK WIENZ

Dosa, menu roti panggang mirip roti masala, India.

DIAOYUTAI STATE GUESTHOUSE: WISMA NEGARA TIONGKOK MEGAH PENUH SEJARAH

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Pemandangan yang indah di Kompleks Fengfei Garden, Diaoyutai State Guesthouse, yang berlokasi di Beijing Tiongkok.

Mengunjungi Beijing di akhir musim semi untuk menghadiri Pertemuan *21st ASEAN-China Senior Officials' Consultation* (ACSOC), kami berkesempatan menyaksikan kemegahan Tiongkok yang terefleksikan dengan baik oleh Diaoyutai State Guesthouse, tempat pelaksanaan pertemuan itu. Lokasi pertemuan yang berpusat di kompleks Fengfai Garden –salah satu bagian dari kompleks Diaoyutai State Guesthouse. Setiap hari para peserta pertemuan dimanjakan oleh pemandangan taman yang luas, danau berair jernih, dan langit Beijing yang sedang bersahabat saat itu.

Diaoyutai State Guesthouse ini terletak di Jalan Fucheng Nomor 2 di Distrik Haidian, bagian barat Beijing, kompleks ini dibangun pada tahun 1958 pada saat RRT mengundang sejumlah Kepala Negara dan Pemerintahan dalam Perayaan 10 tahun berdirinya RRT.

Pemerintah RRT dengan cerdas membangun wisma negara di situs lama Diaoyutai, lokasi dengan pemandangan bagus yang memiliki rekam sejarah lebih dari 800 tahun. Sejak dulu, lokasi yang sekarang menjadi wisma negara ini merupakan penginapan liburan Kaisar Tiongkok. Wisma Diaoyutai selesai dibangun pada malam Hari Nasional tahun 1959. Setelah tahun 1960, para pemimpin dari Partai Komunis Cina seperti Mao Zedong, Liu Shaoqi, Zhou En-lai dan lain-lain seringkali bertandang ke sini untuk melakukan pertemuan atau tinggal untuk sementara waktu.

Saksi Sejarah

Diaoyutai telah menjadi saksi sejarah yang tak ternilai. Hingga saat ini, Diaoyutai State Guest house telah menerima lebih dari 1.287 kepala negara dan pemerintahan asing. Pada awalnya, hanya undangan tamu negara berhaluan sosialis saja yang dapat masuk ke tempat ini. Namun keadaan telah berubah dengan dipersilahkannya

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Salah satu ruang megah di Diaoyutai State Guesthouse.

PANORAMIO.COM

Gerbang masuk Diaoyutai State Guesthouse.

sejumlah tamu dari berbagai bangsa untuk menikmati Wisma Diaoyutai. Sekarang, dengan meningkatnya kegiatan resmi kenegaraan maupun bisnis yang diadakan di Diaoyutai, semakin banyak pengusaha dan lapisan masyarakat lainnya yang dapat menikmati keindahan wisma ini.

Banyak pertemuan bersejarah telah dilakukan di tempat ini. Antara lain, negosiasi RRT-Inggris dan RRT-Portugis pada tahun 1980-an untuk menentukan masa depan Hong Kong dan Makau, serta "*Six Party Talk*" yang melibatkan RRT, Korea Utara, Korea Selatan, Rusia, Jepang, dan Amerika Serikat guna membicarakan masalah nuklir Korea Utara sejak Agustus 2003. Sejumlah tokoh penting telah mengunjungi kompleks ini seperti Perdana Menteri Margareth Tatcher, Presiden Richard Nixon, Presiden Ronald Reagan, Presiden George W. Bush, Presiden Boris Yeltsin, Presiden Vladimir Putin, dan juga Presiden Soekarno.

TAIDEN.COM

Ruang pertemuan Diaoyutai State Guesthouse, kerap dgunakan untuk aktivitas kenegaraan dan diplomatik.

State of the Art

Sejak dibangun pada tahun 1958, Diaoyutai State Guest house telah mengoleksi ribuan karya berharga. Lukisan, kaligrafi, porselen dan mebel dari dinasti Ming dan Qingyang terpajang indah di beberapa tempat. Keberadaan benda-benda tersebut membuat pengunjung seakan-akan berada di ruang pameran. Suasana oriental yang kental dilengkapi dengan barang-barang koleksi berharga ini merupakan kesempatan bagi para tamu untuk dapat memahami budaya Tiongkok secara lebih mendalam.

Tidak hanya itu, Wisma Diaoyutai juga menyediakan makanan terbaik dari negeri Tirai Bambu. Data menunjukkan bahwa lebih dari 70.000 tamu diterima untuk makan malam setiap tahunnya di tempat ini. Berbagai jenis masakan dengan bahan-bahan terbaik seperti sup bunga krisan, sup sirip hiu, *pan-fried* hati angsa hingga kue-kue tradisional Tiongkok nan lezat, lengkap disediakan.

Meski Wisma Diaoyutai yang dijaga ketat oleh pasukan pengamanan Tiongkok ini tidak dapat dinikmati secara bebas oleh masyarakat umum, namun tempat yang dulunya merupakan lokasi pemancingan favorit Kaisar Zhangzong dari Dinasti Jin (abad 11 Masehi) ini tetap merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi kebanggaan rakyat Tiongkok. Keseriusan RRT mengelola dan menjaga aset negara ini bisa menjadi teladan bagi negara lainnya, termasuk Indonesia. Melalui Wisma Diaoyutai, RRT mampu memberikan citra yang baik atas negaranya. •

DIT. MITRA WICARA ANTAR KAWASAN

PESONA WISATA PANTAI PANGANDARAN

LIABELLE.COM

Pantai terbaik se-Pulau Jawa menurut situs AsiaRooms. Pantai yang landai dengan pasir putih yang mempesona.

Ingin menikmati indahnya pemandangan matahari terbenam atau terbit di pantai yang landai dan bersih? Tak harus pergi jauh-jauh ke Bali. Pantai Pangandaran, yang terletak di Kabupaten Ciamis, ternyata tak kalah indah. Malah, Pantai Pangandaran ternyata telah diakui sebagai pantai dengan pemandangan yang terbaik di seluruh Pulai Jawa, menurut AsiaRooms, situs penyedia layanan reservasi hotel secara online untuk wilayah Asia dan Oseania yang berbasis di Singapura dan Bangkok.

Keindahan alamnya memang mengagumkan. Pantai yang jaraknya sekitar 393 km dari kota Jakarta ini memiliki hamparan pasir putih yang mempesona. Anda bisa menyaksikan matahari terbenam dan terbit, dari lokasi yang sama. Pantainya pun landai dan airnya jernih, sehingga sangat cocok dan aman untuk berwisata renang. Taman lautnya juga begitu indah dengan beragam jenis biota lautnya. Tambahan lagi, tiap bulan Juni atau Juli, wisatawan bisa menyaksikan *event* menarik disini, yaitu festival layang-layang internasional.

Tak hanya itu. Pangandaran yang kini jadi andalan pariwisata pemda Jawa Barat ini, juga sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung, sehingga wisatawan bisa melakukan beragam kegiatan menarik. Mulai dari *parasailing, jetski*, rental sepeda, dan bahkan terdapat, *waterboom*, diskotik, sampai gedung bioskop.

Selain itu, di sekitar pantai Pangandaran juga terdapat banyak lokasi wisata alam yang unik. Berikut ini beberapa obyek wisata populer di kawasan Pangandaran. yang menarik untuk dikunjungi.

Cagar Alam Pangandaran.

Cagar alam ini luasnya sekitar 1.000 hektar, dan memiliki berbagai koleksi flora dan fauna yang langka. Seperti, banteng, rusa, dan beberapa jenis kera yang dilindungi. Di Cagar alam ini terdapat juga bunga raflesia padma yang sangat langka. Selai itu, di lokasi ini para wisatawan dapat berjalan menelusuri goa alam dan goa buatan yang terdapat di area ini. Antara lain, Goa Parat, Goa Panggung, Goa Lanang, Goa Sumur Modal dan juga Goa Jepang. Dari goa-goa ini wisatawan dapat melihat keindahan di dalam goa

SOUNDOFMOUNTMALANG

Stalagnit di Goa Panggung, Pangandaran

yang masih sangat alami stalaknit-stalaknit alam yang ada di dalam goa memiliki bentuk yang aneh, menarik, dan mempesona.

Selain itu terdapat juga sumber mata air Rengganis, pantai pasir putih yang sangat indah dan juga taman laut yang menakjubkan. Anda juga dapat melihat sebuah batu yang menyerupai paha ayam, lalu terdapat batu kelamin yang konon dapat memberikan jodoh bagi siapa saja yang menyentuh batu itu. Lalu, terdapat juga karang yang dapat mengeluarkan bunyi ketika dipukul-pukul.

Menyusuri goa di pantai Pangan–daran memang sangat memberikan pengalaman yang seru, pasalnya banyak keunikan yang disajikan oleh alam, termasuk batu kristal yang memancarkan kelap-kelip, dan berbagai batu lainnya yang menyerupai berbagai hewan.

Green Canyon

Green Canyon Pangandaran yang pada awalnya disebut Cukang Taneuh merupakan jembatan yang terbuat dari tanah dengan lebar 3 meter dan berada di atas tebing kembar di tepi sungai. Keajaiban tebing indah ini ditemukan oleh turis asal Prancis kemudian menamai tebing berlumut hijau ini dengan sebutan Green Canyon.

TRAVELLINGASIK

Tebing indah di Green Canyon

Daya tarik wisata Green Canyon di Pangandaran ini adalah aliran sungai Cijulang yang melintas menembus gua yang penuh dengan keindahan pesona stalaktif dan stalakmitnya. Green Canyon ini laksana lukisan alam yang unik dan mengundang hasrat untuk menjelajahinya. Para wisatawan dapat menyelam atau berenang di tempat ini sembari mengikuti aliran arus air.

Wisatawan yang ingin menyusuri sungai dan menikmati keindahan Green Canyon, dapat menggunakan ketinting (perahu). Saat menyusuri sungai, akan terlihat keindahan pepohonan di tepi sungai dan ketika mencapai satu lokasi yang indah, perahu akan berhenti tepat di bawah area tebing tinggi yang berdiri di setiap sisi sungai dengan hiasan stalaktit serta stalagmit, dan aliran air jernih yang turun dari sisi-sisi tebing dengan suara gemuruh air terjun yang membuat kunjungan wisata ini menjadi sulit untuk dilupakan.

Pantai Batu Karas

Pantai Batu Karas adalah pantai yang menawarkan suasana alam yang tenang serta gelombang laut yang

PASIRPANTAI.COM

Batu Hiu, Batu Karas

bersahabat. Beberapa kegiatan wisata yang dapat dilakukan misalnya, berenang, berperahu di bengawan, berkemah, dan bahkan berselancar.

Pantai Batu Karas adalah salah satu tempat wisata Pangandaran yang disukai wisatawan asing. Telah tersedia sejumlah pondok wisata yang dilengkapi dengan arena bermain dan rumah ibadah di kawasan Pantai Batu Karas ini. Salah satu tempat menarik di Pangandaran ini juga menjadi pilihan tempat wisata keluarga. Pantai Batu Karas memiliki air laut yang bersih dan kebiruan, dan merupakan tempat wisata bersantai yang perlu dikunjungi saat berada di Pangandaran.

Citumang Pangandaran

Salah satu tempat wisata alam Pangandaran ini menawarkan panorama alam yang indah. Objek wisata Citumang Pangandaran adalah sebuah sungai yang membelah hutan

INFORMASIPANGANDARAN.COM

Sungai Citumang

jati dengan air sungai yang bersih dan kebiru-biruan. Pada beberapa spot, Sungai Citumang dapat digunakan untuk kegiatan berenang dan bermain. Keistimewaan dari tempat wisata ini adalah pesona aliran sungai dan panorama alam di sekelilingnya.

Pangandaran Waterpark

Pangandaran Waterpark ini adalah objek wisata yang relatif baru di kawasan Pangandaran. Lokasi

FLICKR.COM

Pangandaran Waterpark berada sekitar 5 km sebelum pintu masuk wisata Pangandaran. *Waterpark* ini dibangun di atas lahan seluas lebih dari 10 hektar dengan sejumlah kolam besar dan lapangan khusus buat *ATV track*. Di tempat ini, Anda dapat bermain-main seperti luncuran, *waterbom*, petualangan seperti *highrope*, dan *ATV track*.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

GANDENG SETNAS ASEAN
BP BATAM BERGEGAS SAMBUT MEA

FOTO.NET

Guna menyiapkan diri menyambut pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, Badan Pengu–sahaan Batam (BP Batam) bersama Sekretariat Nasional ASEAN-Indonesia (Setnas ASEAN-Indonesia) menyelenggarakan Seminar Nasional dengan tema "Kesiapan Batam Dalam Melaksanakan Masyarakat Ekonomi ASEAN". Seminar ini berlangsung pada tanggal 20-21 Mei 2015, dan di gelar di Ruang serbaguna Hotel Harris, Batam.

Batam adalah wilayah di Indonesia yang spesial karena memiliki Zona Perdagangan Bebas *(Free Trade Zone/FTZ)*. Dengan keistimewaan itu, Batam menjadi wilayah strategis untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tengah globalisasi ekonomi dunia. Batam yang secara geografis berdekatan dengan Singapura dan Malaysia diharapkan dapat menjadi pusat gerbang industri perdagangan yang berorientasi ekspor dan impor. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang akan diberlakukan akhir tahun 2015 menjadi suatu kesempatan bagi Batam dalam memperluas perdagangan Indonesia di ranah global.

Dalam seminar itu, Rossalis R. Adenan, pembicara yang mewakili Setnas ASEAN-Indonesia menjelaskan mengenai ASEAN dan Visi Indonesia mengenai ASEAN, Masyarakat ASEAN, MEA serta peluang dan tantangan yang akan timbul dari pemberlakuan MEA 2015. Ia juga menjelaskan mengenai berbagai hal terkait dengan kebijakan pemerintah dalam menyosong diberlakukannya MEA serta menekankan perlunya sinergi nasional yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk sektor pendidikan dalam meningkatkan daya saing nasional.

Sementara itu, Tagor Napitupulu, narasumber dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri menyampaikan berbagai potensi dan kebijakan Pemprov Kepri di sektor pendidikan, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas lulusan baik sekolah menengah maupun perguruan tinggi yang disesuaikan dengan letak geografis dan geostrategis Provinsi Kepri yang berdekatan dengan Singapura dan Malaysia. Menurutnya, MEA perlu disikapi secara positif dan optimis. Untuk bisa mengambil manfaat MEA, tenaga kerja Indonesia perlu meningkatkan daya saing dengan mempersiapkan dan meningkatkan

kualitas diri sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Selanjutnya, seminar di hari kedua menghadirkan oleh enam pembicara. Yaitu, Ketua Tim Pelaksana Harian Setnas Asean Indonesia, Ngurah Swajaya, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM, Siswantoro, Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha Pelindo II, Saptono R. Rianto, Kasi Import, Ditjen Bea Cukai Dwiyono Widodo, Kabalitbang dan Informasi Kemnaker, Sugiarto Sumas, serta Jadi Rajaguguk dari Kadin Batam.

Seminar menegaskan bahwa MEA dan FTZ bisa memberikan dampak positif ataupun negatif terhadap kesempatan kerja di dalam negeri, termasuk Batam. Namun, semua itu sangat tergantung pada pemahaman tentang MEA dan FTZ, serta kondisi ketenagakerjaan Indonesia. Dengan pemahaman yang tepat, pihak terkait dapat merancang dan melaksanakan kebijakan yang *pro job*.

Pemerintah, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan mau tidak mau harus mendukung pelaksanaan FTZ di Batam melalui kebijakan ketenagakerjaan yang dapat mempesona investor asing di antaranya dengan kebijakan perijinan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang lebih longgar. Namun demikian, Kementerian Ketenagakerjaan juga harus terus berupaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui berbagai program pelatihan kerja sehingga dapat bersaing. Dengan begitu, pihak asing tidak memonopoli dunia kerja dan perdagangan di tanah air ini.

Seminar juga menegaskan perlunya sinergi dari semua pemangku kepentingan yang ada di Batam, termasuk dengan instansi di Pusat untuk menarik investasi masuk ke Batam. Menurut catatan BKPM, Batam selama ini tercatat sebagai wilayah yang realisasi investasinya termasuk tinggi, terutama di sektor logam dan transportasi. Ke depan diharapkan upaya untuk menarik investor asing ke Batam perlu terus lebih ditingkatkan, terutama investor dari Singapura dan Malaysia.

WIKIMEDIA.ORG

Jembatan Barelang di Batam

Selain itu, pembangunan sektor perhubungan laut, termasuk prasarana pelabuhan akan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah RI. Hal ini seiring dengan semakin meningkatnya volume perdagangan antar pulau di Indonesia. Pada tahun 2011 saja tercatat peningkatan volume perdagangan lima kali lipat dibandingkan dengan tahun 2006. Ke depan, diharapkan jumlah kapal pengangkut barang atau kontainer dengan volume besar dan biaya murah akan semakin banyak sehingga harga barang juga semakin kompetitif. Dengan demikian, transportasi laut nasional di masa yang akan datang dapat lebih efisien dalam segi waktu dan biaya.

Seminar nasional tersebut diselenggarakan selama dua hari. Pada hari pertama, seminar diikuti oleh perwakilan pelajar dan Mahasiswa dari seluruh SMK dan Universitas di Batam. Sedangkan hari kedua, peserta adalah dari kalangan pemangku kepentingan, seperti kalangan Pemda dan pengusaha di Batam. Secara keseluruhan, seminar nasional yang digelar pada 20-21 Mei 2015 ini diikuti oleh sekitar 250 orang.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Setnas ASEAN, *Talk Show* di RRI DAN TVRI Batam

Di sela-sela penyelenggaraan seminar di Batam, Setnas ASEAN-Indonesia melakukan acara talk show di TVRI dan RRI Batam. Talk show ini bertujuan untuk mensosialisasikan Masyarakat ASEAN kepada masyarakat Batam. Pada acara talk show di RRI Batam yang dilakukan pada tanggal 20 Mei 2015, Didik Trimardjono dari Setnas ASEAN-Indonesia memberikan gambaran tentang ASEAN dan MEA yang akan segera diberlakukan di penghujung tahun ini. Dalam acara yang berlangsung selama satu jam ini, seorang pendengar yang merupakan WNI yang bekerja di Singapura ikut berpartisipasi melalui telepon. Ia sangat optimis dengan MEA dan yakin Indonesia tidak akan kalah bersaing.

"Kita harus optimis dalam menyambut MEA ini. Kami pekerja di Singapura siap kembali ke tanah air dengan ilmu yang kami dapat dari bekerja di negara tetangga. Yang kita butuhkan hanyalah mental dan kemauan yang kuat," ujar penelepon itu.

Sementara itu, pada acara talk show TV Batam, narasumber yang hadir adalah Ketua tim Pelaksana Harian Setnas ASEAN-Indonesia, Kabalitbang dan Informasi Kemnaker, serta Ketua KADIN Batam. Dari talk show dan dialog interaktif dengan pemirsa tersebut, dapat dicatat bahwa kota Batam dengan segala potensinya, terus berupaya untuk meningkatkan kesiapan dalam menyongsong MEA 2015 melalui peningkatan daya saing di berbagai sektor.

SUMENEP SIAP SAMBUT MEA

LENSAINDONESIA.COM

Salah satu pulau di kabupaten Sumenep.

Sebagai salah satu 50 Kabupaten/Kota terkaya di Indonesia, Sumenep harus dapat memaksimalkan peluang Masyarakat ASEAN. Demikian diutarakan oleh Wakil Bupati Sumenep Soengkono Sidik, dalam sambutannya pada pembukaan Seminar Masyarakat ASEAN di Pendopo Kabupaten Sumenep pada tanggal 1 Juni 2015.

"Jajaran SKPD, pelaku usaha, dan masyarakat Sumenep harus menyiapkan mental, menguasai bahasa asing, dan meningkatkan kapasitas diri guna menyambut pemberlakuan Masyarakat ASEAN pada 31 Desember 2015 mendatang," imbuh Wakil Bupati.

Senada dengan Wakil Bupati, Rektor Universitas Wiraraja yang hadir sebagai pembicara seminar menyatakan bahwa, peluang Masyarakat ASEAN dapat dimaksimalkan apabila Indonesia memiliki tenaga kerja yang memiiki daya saing tinggi. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, I Gusti Agung Wesaka Puja, menyampaikan bahwa Masyarakat ASEAN akan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat Indonesia, termasuk Sumenep, dengan syarat utama adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni.

Rangkaian kegiatan Sosialisasi Masyarakat ASEAN di Sumenep menghadirkan narasumber Inspektur Jenderal Kementerian Luar Negeri, Ibnu Said, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep, serta Rektor Universitas Wiraraja. Ibnu Said dalam paparannya menyampaikan sejumlah hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan potensi peluang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Antara lain, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, promosi pariwisata, dan standardisasi produk. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumenep menambahkan upaya-upaya tersebut juga harus diiringi dengan peningkatan daya saing angkatan kerja dan memperkuat produk industri Sumenep.

Adapun Rektor Unija dalam paparannya menyampaikan pentingnya peran serta perguruan tinggi untuk menghadapi Masyarakat ASEAN 2015. Salah satunya adalah dengan menciptakan angkatan kerja terdidik.

Peningkatan sektor UKM juga penting dalam menghadapi Masyarakat ASEAN. Salah satunya, meningkatkan akses pasar bagi UKM. Langkah yang bisa diambil antara lain, perbaikan serta peningkatan kualitas pasar tradisional, akses kredit usaha, dan bimbingan dalam standardisasi produksi serta pengemasan.

Terkait dengan prioritas dan sinkronisasi regulasi, seluruh unsur di tingkat pusat dan daerah hendaknya dapat mensinergikan kebijakan di tataran strategis (pemerintah pusat), operasional (provinsi), dan teknis (kabupaten/kota). Sementara itu, sehubungan dengan isu pengungsi Rohingya, Ibnu Said menegaskan keterlibatan Indonesia adalah dengan mengedepankan pendekatan konstruktif.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

UNIJA BUKA PSA PERTAMA DI MADURA

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN bekerja sama dengan Universitas Wiraraja (Unija) menandatangani nota kesepahaman pembentukan Pusat Studi ASEAN (PSA) di Unija. Penandatanganan dilakukan dalam rangkaian acara Seminar Masyarakat ASEAN di Kabupaten Sumenep pada 1 Juni 2015. PSA ini merupakan yang ke-14 di seluruh Indonesia, dan yang pertama di Pulau Madura.

Diharapkan pembentukan PSA ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam membantu Pemerintah Kabupaten merumuskan kebijakan yang dapat mendukung kesiapan Sumenep dalam menghadapi Masyarakat ASEAN. Selain itu, pembentukan PSA ini juga diharapkan dapat menjadi sarana networking dan exchange of knowledge bagi pemangku kepentingan di Pulau Madura dengan institusi pendidikan serta riset lainnya di kawasan ASEAN.

Dalam waktu dekat PSA Unija berencana untuk mengadakan konferensi dan seminar bersama dengan PSA lainnya guna menyusun bahan rekomendasi bersama terkait kesiapan daerah dalam menghadapi Masyarakat ASEAN.

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Suasana Lomba Simulasi Sidang (ASEAN Model) bagi Pelajar SMA/K dan MA se-Provinsi Banten di Ruang Paripurna Gedung DPRD Banten, Kota Serang, 25-27 Mei 2015

PELAJAR BANTEN ANTUSIAS HADAPI MASYARAKAT ASEAN 2015

Pembentukan Masyarakat ASEAN yang akan mulai bergulir pada akhir tahun ini mengharuskan masyarakat Banten untuk terus meningkatkan daya saing. Selain itu, masyarakat Banten juga harus punya kesadaran yang tinggi untuk tetap menonjolkan karakter budaya sebagai jati diri bangsa di dunia internasional. Hal itu disampaikan Asep Rahmatullah, Ketua DPRD Banten saat membuka Lomba Simulasi Sidang (ASEAN Model) bagi Pelajar SMA/K dan MA se-Provinsi Banten yang berlangsung di Ruang Paripurna Gedung DPRD Provinsi Banten, Serang, tanggal 25-27 Mei 2015

Kegiatan Lomba Simulasi Sidang ASEAN se-Provinsi Banten ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, dengan partisipasi dan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Banten. Hal ini merupakan wujud komitmen yang tinggi dari Pemprov Banten dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kesiapan para pemuda, khusunya pelajar tingkat lanjutan di Provinsi Banten dalam menghadapi Masyarakat ASEAN 2015.

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Penyerahan Piala oleh Sekretaris Ditjen Kerja Sama ASEAN, Kemlu kepada Juara I Kategori Utama: MAN Insan Cendikia Serpong

"Saya sangat senang mendapatkan kesempatan berpartisipasi dalam perlombaan simulasi sidang ini. Sudah pasti ini merupakan pengalaman yang sangat berharga bagi saya, karena melalui kegiatan ini wawasan saya tentang ASEAN semakin bertambah, dan rasa percaya diri saya semakin meningkat," ungkap Gilang Al Giffari, peserta dari MAN Insan Cendikia yang meraih gelar the Best Speaker dalam lomba ini.

Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Iwan Sujudhie Amri dalam *keynote speech*-nya menekankan bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi tantangan yang semakin kompleks, tidak hanya dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala internasional, terutama menyusul akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Hal ini tentunya menuntut keseriusan semua pihak untuk menyiapkan diri, meningkatkan kualitas dan daya saing agar kita semua menjadi pemain, bukan sekedar menjadi penonton. Ditegaskan pula bahwa dalam menghadapi integrasi masyarakat ASEAN dibutuhkan kerja keras, diantaranya melalui upaya peningkatan pemahaman publik, termasuk para pelajar mengenai peluang dan tantangan Masyarakat ASEAN agar menjadi generasi penerus yang tangguh dalam persaingan global.●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

PERKUAT KERJA SAMA DENGAN ASEAN

INDIA RESMIKAN KANTOR PERWAKILAN DI JAKARTA

JAKARTA POST

Menlu India (tengah), bersama Sekjen ASEAN (dua dari kanan), Dirjen Kerjasama ASEAN (paling kiri) dan Dubes India untuk Indonesia (dua dari kanan) dan Dubes India untuk ASEAN (paling kanan), saat peresmian Misi India untuk ASEAN.

India secara resmi membuka misi diplomasinya untuk ASEAN pada hari Kamis, 23 April 2015, di Jakarta. Pembukaan Misi ini bertujuan untuk mengorientasikan kerja sama kemitraan India dan ASEAN menjadi lebih pragmatik dan juga berbasis tindakan. *Soft Opening* pembukaan Misi India untuk ASEAN sebelumnya telah diselenggarakan oleh Duta Besar India untuk ASEAN, Suresh K. Reddy pada tanggal 13 April 2015 lalu.

Acara peresmian kali ini dihadiri oleh Menteri Luar Negeri India, Sushma Swaraj, Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh dan Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, I Gusti Agung Wesaka Puja dan sepakat menyoroti pentingnya kemitraan dan kerja sama antara India dengan negara anggota ASEAN.

"ASEAN ada pada inti kebijakan luar negeri India. Kami bertujuan untuk memainkan peran yang lebih proaktif di wilayah ini, termasuk memperkuat kerja sama di bidang perdagangan, investasi, keamanan dan konektivitas," demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Sushma pada upacara peresmian itu.

Sementara itu, Sekjen ASEAN menambahkan bahwa sejak tahun 1992, India telah menjadi contoh bagi hubungan diplomatik dengan mitra wicara ASEAN lainnya sebagai salah satu hubungan yang paling dinamis dan kuat, terutama pada bidang sosial-budaya dan ekonomi. India dipuji dalam upayanya mempertahankan hubungan diplomatik dengan ASEAN tersebut secara terus menerus.

"Pembukaan Misi ini adalah sebagai simbol komitmen tegas dalam mempertahankan kerja sama ASEAN-India," lanjut Minh.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa masih banyak yang perlu dieksplorasi dalam hubungan diplomatik ASEAN-India, walaupun hubungan kemitraan ini telah diperkuat selama beberapa tahun terakhir.

Dirjen KSA mengutarakan optimismenya bahwa akan terjalin kerja sama yang lebih baik antara ASEAN-India. Terlebih, setelah India memperkenalkan kebijakan barunya *Look East Policy*. Kerja sama yang kuat antara keduanya ini dibuktikan dengan besarnya angka perdagangan India di wilayah ASEAN yang mencapai US$67,861,891 pada tahun 2013.

Kunjungan Menlu India pada upacara peresmian ini bersamaan dengan kunjungannya pada acara Konferensi Asia-Afrika yang berlangsung antara 22 April dan 23 April. Menlu India hadir dalam konferensi mewakili Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang berhalangan hadir.

SUMBER: JAKARTA POST, 24 APRIL 2015

THE 22ND NEAT CCM: MENJAWAB TANTANGAN SEKTOR MARITIM ASEAN PLUS THREE

Daerah pesisir di Asia Timur merupakan kawasan yang sesuai untuk pengembangan aktivitas ekonomi di berbagai bidang, mulai dari pertanian, budi daya perairan, industri ekstraktif, sampai pariwisata. Ekosistem di kawasan ini telah menghasilkan lebih dari 40 juta ton ikan per tahunnya serta memproduksi sekitar 80% dari hasil budi daya perairan dunia.

"Kerja sama maritim sangat potensial untuk dapat dikembangkan secara lebih mendalam dan bermanfaat, baik itu antar negara anggota ASEAN maupun dengan Mitra Wicara ASEAN." ujar I Gusti Agung Wesaka Puja, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan *22nd Country Coordinator's Meeting of the Network of East Asia Think-Tanks (NEAT CCM)* di Yogyakarta. (4/5).

Melalui tema *"Enhancing Maritime Cooperation in the Context of ASEAN Plus Three"*, yang diusung Indonesia sebagai *chair and host country NEAT* pada tahun 2015 ini, disepakati pentingnya pembangunan dan peningkatan kerja sama maritim dalam berbagai aspek seperti keamanan, konektivitas, dan lingkungan, termasuk penanggulangan *Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing*.

Sesuai kapasitasnya sebagai *think-tank*, lima negara telah mengusulkan *concept paper* untuk dibahas dalam *Working Group NEAT* selama tahun 2015, yaitu Thailand (*Seamless Connectivity: Transforming Multi-modal System into Economic Corridors*); Singapura (*Good Urban Planning: Sustainable Development and Better Quality of Life*); Jepang (*Maritime Cooperation in East Asia)*; RRT (*Asia East Asian Poverty Reduction*); dan Republik Korea (*Institutional Sustainability of NEAT towards the East Asian Community*).

Pertemuan NEAT CCM ke-22 yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Mei 2015 di Yogyakarta, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan NEAT CCM tahun 2015. Program kegiatan NEAT adalah kegiatan bersama antara Kementerian Luar Negeri RI, Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk ASEAN dan Pusat Studi ASEAN (PSA) Universitas Indonesia sebagai wakil Indonesia *(country coordinator)* di NEAT.

Di sela-sela pertemuan NEAT CCM ke-22, telah dilaksanakan juga Pertemuan informal antar PSA yang difasilitasi oleh Direktorat Mitra Wicara dan Antar Kawasan, Ditjen KSA, Kemlu RI. Kemlu RI mendorong peran aktif PSA dalam melakukan sosialisasi Masyarakat ASEAN 2015 baik untuk kalangan akademisi maupun untuk masyarakat luas. Selain wakil-wakil dari negara anggota APT, pada Pertemuan kali ini turut hadir 8 Pusat Studi ASEAN (PSA) dari Universitas Padjajaran Bandung, Universitas Andalas Padang, Universitas Sam Ratulangi Manado, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Brawijaya Malang, Universitas 17 Agustus Semarang, dan *London School of Public Relations* Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pertemuan NEAT CCM berikutnya akan digelar di Bandung, September 2015, dengan mengusung agenda besar yang sama.●

DIT. MITRA WICARA DAN ANTAR KAWASAN

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Para peserta 22nd Country Coordinator's Meeting of the Network of East Asia Think-Tanks (NEAT CCM) di Yogyakarta. (4/5).

NEAT CCM

Network of East Asia Think-Tanks (NEAT) adalah forum non-pemerintah (track-2) dari negara-negara yang tergabung dalam kerangka ASEAN Plus Three (APT) yaitu Jepang, Republik Korea dan RRT, yang diharapkan dapat berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

DUA KARANG MEA

ANSERAI.COM

ASIAONE.COM

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA, akan segera diberlakukan di penghujung tahun 2015. Saat ini, kesiapan implementasi dari langkah-langkah prioritas untuk menuju MEA telah mencapai 82,1 persen. Secara kuantitatif, angka ini menunjukkan bahwa persiapan MEA berjalan dengan sa–ngat baik. Di atas kertas, seharusnya tidak ada kendala yang berarti untuk mewujudkan pasar tunggal ASEAN di akhir 2015. Barang, jasa, modal, investasi dan tenaga kerja pun akan segera dapat bergerak bebas di kawasan. Tapi, benarkah negara-negara di ASEAN telah siap menjalankan MEA?

MEA, sebagaimana integrasi ekonomi kawasan yang lain, seharusnya bertujuan untuk meliberalisasi perdagangan dan investasi di kawasan. Paham liberalisme ekonomi bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya kepada manusia. Dalilnya adalah, dengan adanya keleluasaan untuk memasarkan hasil produksi maka akan tercipta persaingan kualitas dan harga antar produsen. Dengan persaingan itu, konsumen-lah yang akan mengambil keuntungan terbesar. karena dapat memperoleh produk yang terbaik dengan harga yang seekonomis mungkin. Konsumen yang dimaksud tak lain adalah penduduk atau masyarakat di seluruh negara ASEAN.

Artinya, dalam MEA, tanpa ada–nya sentimen kebangsaan, seharusnya tidak ada alasan bagi seorang konsumen Indonesia untuk tidak membeli beras Thailand yang berharga lebih murah, dengan kualitas yang sama dengan beras Indonesia. Lalu, adakah alasan bagi konsumen Indonesia untuk membeli kopi luwak produksi Myanmar, ketika pada saat yang bersamaan tersedia kopi serupa produksi Indonesia dengan kualitas dan rasa yang jauh lebih baik?

Meskipun semangat dari MEA adalah liberalisasi, akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah bentuk dari proteksionisme. Proteksionisme lahir dari rahim statisme yang mengedepankan peranan negara dalam pasar. Negara-negara anggota ASEAN berlomba-lomba untuk melindungi produsen mereka. Berbagai macam sentimen nasionalisme digaungkan sebagai *raison d'etre* untuk melindungi produsen dalam negeri. Melindungi pelaku pasar dalam negeri dianggap sebagai bagian dari pemenuhan kepentingan nasional untuk mencegah para produsen dalam negeri kalah dalam persaingan mendapatkan pangsa pasar.

Produsen dalam negeri yang khawatir akan mengalami kesulitan dalam pasar bebas menuntut peme–rintah untuk menerapkan berbagai macam instrumen untuk melindu–

ngi industri tersebut, seperti subsidi, regulasi, atau apapun. Inilah yang menciptakan hambatan tarif maupun hambatan non-tarif *(tariff and non-tariff barriers)* dari sudut pandang produsen luar negeri. Logika ini merupakan logika negara *vis a vis* negara lain, bukan logika berpikir konsumen *vis a vis* produsen. Kepentingan konsumen, menjadi variabel yang dinafikan oleh kaum *statis-proteksionis*. Padahal idealnya, negara mengemban tanggung jawab besar bukan hanya kepada produsen dalam negeri, tapi juga konsumen dalam negeri atau rakyatnya.

Liberalisme dan proteksionisme adalah dua karang yang dihadapi oleh ASEAN dalam proses menuju MEA 2015. Meminjam istilah Bung Hatta, saat ini ASEAN sedang "mendayung di antara dua karang" untuk menuju ke integrasi ekonomi kawasan. Tanpa adanya konsensus bersama untuk menentukan ke mana arah dan tujuan MEA, maka hampir dipastikan bahwa MEA akan terus terpuruk di kubangan masalah yang sama dari waktu ke waktu. Tak bisa dipungkiri, bahwa semua negara berharap untuk dapat memetik manfaat sebesar-besarnya dari liberalnya pasar di negara lain. Namun, di saat yang sama sebisa mungkin juga berupaya melindungi pasar dalam negerinya sendiri. *"Keynes at home, Smith abroad"*. Yaitu, di dalam negeri menerapkan mazhab Keynesian yang protektif, tetapi mempromosikan liberalisasi ala Adam Smith kepada negara lain. Tidak ada satupun negara anggota ASEAN yang sebegitu naifnya untuk tidak ikut memainkan permainan ini. Sebuah permainan yang dimainkan di nyaris semua forum perdagangan bebas atau integrasi ekonomi di dunia. Para raksasa ekonomi dunia seperti AS, Tiongkok, Uni Eropa, Jepang atau India pun menjadi pendekarnya. Permainan inilah yang menjegal CPO dan kayu Indonesia di pasar Amerika dan Eropa.

Lantas bagaimana Indonesia, Sang *"Primus Inter Pares"* di ASEAN, harus bersikap di tengah kegalauan dan pesimisme di pintu gerbang integrasi ekonomi kawasan?

JUZMONEY.COM

THEREPUBLICSQUARE.COM

Jawabannya, sudah disediakan oleh *Founding father* kita, Soekarno, dalam Tri Sakti. Yaitu, dengan "berdikari dalam ekonomi". Kemandirian adalah satu-satunya vaksin yang dapat menjadikan Indonesia imun dari efek buruk yang mungkin timbul dari pasar bebas.

Resepnya, Indonesia harus mampu memproduksi sendiri dalam jumlah yang cukup, dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar, untuk semua kebutuhan pokok warga negaranya, seperti kebutuhan pangan dan energi. Dengan terpenuhinya kebutuhan mendasar yang menjadi bagian dari hajat hidup orang banyak, maka ada atau tidaknya pasar bebas menjadi kurang relevan. Ini karena, rakyat hanya perlu mencari kebutuhan sekunder atau tersier saja dari pasar tunggal maupun pasar bebas. Perlu dipahami, bahwa kemandirian ekonomi bukanlah suatu bentuk phobia terhadap kekuatan ekonomi asing, melainkan suatu naluri alamiah sebagai sebuah bangsa.●

DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

PELUANG DAN TANTANGAN RCEP BAGI ASEAN

Menyadari besarnya tantangan kesenjangan pembangunan antar anggota, negara anggota sepakat untuk membentuk wadah kerja sama berbagai program *capacity building*

Perkembangan arsitektur ekonomi ASEAN yang terus meluas, merupakan peluang bagi negara-negara mitra ASEAN. Peluang bagi mereka untuk memperdalam kerjasamanya dengan ASEAN, dan memperluas integrasi kawasan. Meskipun demikian, upaya ini seolah-olah menjadi "dua sisi koin" yang berbeda.

Pada satu sisi, perluasan kerjasama ekonomi ini mampu memberikan kesempatan bagi negara anggota ASEAN untuk memajukan perekonomian regional. Tapi di sisi lain, upaya tersebut juga dapat mengancam sentralitas dan kohesivitas ASEAN. Dengan kata lain, perkembangan arsitektur ekonomi kawasan merupakan suatu peluang dan tantangan bagi ASEAN.

Upaya untuk mengembangkan arsitektur ekonomi kawasan yang dimaksud adalah kerjasama R*egional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*. RCEP merupakan wadah kerjasama ekonomi dengan berfokus terhadap pembangunan ekonomi merata *(equitable economic development)* dan upaya memperkecil kesenjangan pembangunan *(narrowing development gap)*.

Ide pembentukan RCEP diprakarsai oleh Indonesia saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-19 tahun 2011. Usulan pembentukan RCEP tersebut kemudian disambut baik oleh negara mitra ASEAN, yakni Australia, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Tiongkok. ASEAN telah memiliki *Free Trade Agreement (FTA)* dengan masing-masing negara mitra tersebut dalam kerangka kerjasama ASEAN+1 FTA. Dengan demikian, perjanjian RCEP nantinya akan mengacu pada perjanjian ASEAN+1 FTA yang sudah ada.

Berbicara mengenai peluang, tidak diragukan bahwa RCEP mampu menjadi pintu bagi ASEAN untuk meningkatkan pasar 600 juta penduduk di kawasan. Enam negara mitra ASEAN memiliki tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) yang tinggi; Tiongkok (USD 9,240,270/peringkat ke-2), Jepang (USD 4,919,563/ peringkat ke-3), India (USD 1,875,141/ peringkat ke-10), Australia (USD 1,560,372/ peringkat ke-12), dan New Zealand (USD 185,788/ peringkat ke-54).

Artinya, tingkat konsumsi, investasi, dan produksi di negara-negara tersebut tergolong sangat baik. Tingkat konsumsi yang baik ini mengindikasikan bahwa pasar tersebut mampu menjadi target potensial untuk *supply* produk ASEAN. Investasi membuka kesempatan bagi ASEAN dalam meningkatkan infrastruktur dan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Produksi di negara-negara mitra tersebut juga membantu ASEAN dalam memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa yang berkualitas bagi kawasan. Dengan kata lain, RCEP membuka peluang pasar yang lebih besar bagi ASEAN sekaligus mendorong peningkatan kegiatan perekonomian yang efektif.

Namun demikian, membuka pasar yang lebih besar tidak serta merta berlangsung tanpa adanya hambatan dan tantangan. Hambatan yang mengemuka bagi ASEAN terletak pada kapasitas dari masing-masing negara anggota yang cenderung masih berbeda jauh satu sama lain. Hal ini terlihat dari indeks daya saing dari masing-masing negara. Berdasarkan data dari *World Economic Forum (WEF),* indeks daya saing negara-negara ASEAN tahun 2014 sangat beragam. Singapura berada di peringkat ke-dua dunia dan peringkat pertama di ASEAN dengan

BUSINESSKOREA.CO.KR

RCEP Meeting ke-lima di Singapura , 2014.

skor 5.65, sedangkan Myanmar berada di peringkat ke-134 dunia dan peringkat terakhir di ASEAN dengan skor 3.24.

Jika dianalisis lebih lanjut, kesenjangan pembangunan ini menjadi permasalahan bagi intra-ASEAN. Sebagai suatu Komunitas, ASEAN menghendaki adanya kohesivitas antar negara anggota, salah satunya dengan terwujudnya konektivitas fisik *(physical connectivity)*, konektivitas institusional *(institutional connectivity)*, dan konektivitas antar masyrakat *(people-to-people connectivity)*.

Akan tetapi, isu konektivitas di ASEAN malah menjadi sorotan. Lemahnya konektivitas fisik dan institusional contohnya, membuat proses distribusi barang-barang terhambat. In terlihat dari perbedaan *dwelling time* (durasi waktu bongkar muat barang di pelabuhan hingga pendistribusiannya) antara negara anggota yang dipandang cukup signifikan; rata-rata proses *dwelling time* di Singapura adalah 1.5 hari, sedangan di Indonesia bisa mencapai 5.5 hari. Dari aspek daya saing, lima negara mitra FTA ASEAN, kecuali India, termasuk ke dalam peringkat 50 tertinggi indeks daya saing dunia. Sementara itu, negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) masih tertinggal jauh di bawah India. Dengan kondisi demikian, tidak dipungkiri lagi bahwa perbedaan daya saing ini menjadikan RCEP sebagai tantangan bagi ASEAN.

Ditinjau dari tingkat PDB, hanya Indonesia yang masuk peringkat 20 besar PDB terbesar dunia, sedangkan terdapat 5 negara mitra (Tingkok, Jepang, India, Australia, dan Korea Selatan) yang berada pada peringkat 20 besar. Perbedaan tingkat PDB yang signifikan antara ASEAN dengan negara mitra FTA juga menjadi masalah karena menimbulkan kesenjangan efisiensi pasar. Dalam hal produksi, misalnya, ASEAN menghendaki agar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menjadi basis produksi. Kesenjangan tingkat PDB ini secara tidak langsung menandakan adanya perbedaan tingkat dan kemampuan produksi; semakin tinggi PDB, maka terdapat kecenderungan bahwa tingkat produksi akan semakin tinggi pula. Oleh sebab itu, tingkat PDB negara-negara ASEAN yang relatif rendah menandakan

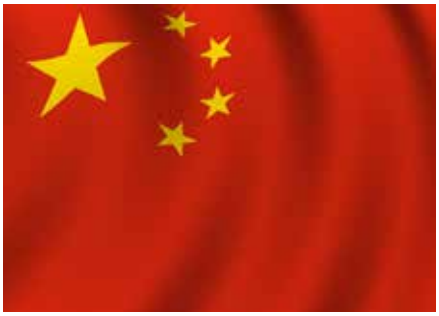

bahwa tingkat produksi ASEAN tidak sebaik dengan negara mitra FTA. Hal ini menjadi tantangan bagi ASEAN sebagai basis produksi.

Lalu, bagaimana ASEAN memanfaatkan RCEP dan mengatasi tantangan RCEP tersebut? Pada prinsipnya, negara anggota RCEP telah menyadari adanya kesenjangan pembangunan antara satu dengan yang lain. Untuk itu, RCEP sepakat untuk membentuk suatu wadah kerjasama sendiri melalui *working group* mengenai kerjasama ekonomi dan teknis. Kerjasama ini umumnya terkait dengan program *capacity building*, seperti *workshop* dan seminar, mengenai pemahaman praktis hukum, teknis negosiasi, peningkatan *awareness*, dan hal-hal teknis kerjasama ekonomi lainnya.

Upaya *capacity building* ini dimaksudkan untuk mempersiapkan negara-negara yang dinilai masih perlu untuk mendapat pemahaman lebih mendalam tentang RCEP sehingga 16 negara anggota dapat menjalankan komitmen dengan pemahaman yang setara. Beberapa program *capacity building* telah diselenggarakan sebelum diberlakukannya perjanjian RCEP.

Singkatnya, RCEP menjadi suatu fenomena dalam perkembangan arsitektur ekonomi di ASEAN yang mampu menjadi peluang dan tantangan. Sebab itu, upaya yang ada saat ini senantiasa digunakan secara optimal untuk memaksimalkan peluang dan mengubah tantangan yang nantinya juga dapat memberikan manfaat secara merata.●

DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

ASEAN OPEN SKY

SINGAPORE AIRLINES GARAP PASAR DOMESTIK INDONESIA?

ASEAN Open Sky adalah kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN melalui pembukaan hak lintas dan angkut udara antar sesama anggota negara ASEAN.

Banyak orang berpikir bahwa dengan adanya *ASEAN Open Sky*, maskapai penerbangan asing akan mudah beroperasi dan menguasai pasar di Indonesia. Mereka membayangkan *Singapore Airlines* bisa terbang melayani penumpang *rute* Jakarta ke Surabaya dan *Thai Airways* terbang dari Bali ke Makasar. Ujungnya, maskapai dalam negeri akan mendapat persaingan ketat dari maskapai negara ASEAN lain. Benarkah begitu?

Rencana perwujudan ASEAN *Open Sky* telah dirancang sejak deklarasi *Bali Concord II* tahun 2003 mengenai terbentuknya ASEAN *Economic Community (AEC)*. Dalam *Bali Concord II,* AEC didukung dengan integrasi 12 sektor yang diprioritaskan guna menghadapi persaingan dari kekuatan ekonomi kawasan Asia yang berkembang pesat seperti Cina dan India. Salah satu dari 12 sektor yang diprioritaskan tadi, adalah integrasi sektor jasa transportasi udara melalui perwujudan *ASEAN Open Sky*.

ASEAN Open Sky adalah kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi jasa angkutan udara ASEAN melalui pembukaan hak lintas dan angkut udara (penumpang dan barang) antar sesama anggota negara ASEAN. Pembukaan hak lintas dan angkut udara di ASEAN diatur dalam implementasi *ASEAN Single Aviation Market* melalui 3 instrumen utama kesepakatan ASEAN. Pertama, *ASEAN Multilateral Agreement on Air Services (MAAS)* beserta 6 protokolnya. Kedua, *ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Air Freight Services (MAAFLAFS)* beserta 2 protokolnya. Ketiga, *Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Air Services (MAFLPAS)* beserta 2 protokolnya.

Berbeda dengan konsep kebijakan Open Sky di kawasan lain, ASEAN Open Sky hanya menegosiasikan hak angkut udara (*Freedoms of the Air*) ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5. Sementara hak angkut ke-6 sampai ke-9, tidak di negosiasikan oleh ASEAN. Hal ini berbeda dengan kawasan lain, (misal EU dan Amerika Serikat) yang telah memberlakukan kebijakan *Open Sky* hingga hak angkut ke-9.

Dengan demikian, kerjasama *ASEAN Open Sky* dapat dikatakan hanya mengatur pertukaran hak angkut udara dari poin ke poin di negara ASEAN. Sementara itu, pertukaran hak angkut udara di dalam domestik negara ASEAN masih diatur oleh masing-masing negara ASEAN. Dalam kaitan ini, sesuai Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Indonesia menerapkan azas *cabotage* yang berarti pelarangan maskapai penerbangan asing untuk beroperasi dari poin ke poin di wilayah domestik Indonesia. Dan hal ini berarti bahwa tidak akan ada penerbangan maskapai *Singapore Airlines* atau *Thai Airways* beroperasi melayani penumpang dari Jakarta ke Surabaya atau *rute* domestik di Indonesia lainnya, sebagaimana yang banyak dikhawatirkan masyarakat Indonesia saat ini.●

WIKIMEDIA.ORG

DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

MASKAPAI INDONESIA SIAP HADAPI ASEAN OPEN SKY

Garuda Indonesia dinobatkan sebagai maskapai terbaik ke-8 di dunia. o;eh Skytrax, lembaga review penerbangan dunia yang berpusat di London, Inggeris.

WIKIMEDIA.ORG

Menyambut *ASEAN Open Sky*, maskapai penerbangan Indonesia terus melakukan inovasi dan peningkatan pelayanan. Tujuannya, agar memiliki daya saing yang kuat di lingkup regional ASEAN, dan diakui dunia. Salah satu maskapai penerbangan Indonesia yang terus melakukan upaya peningkatan pelayanan itu adalah Garuda Indonesia. Beragam hal telah dilakukan oleh Garuda Indonesia. Antara lain, dengani melakukan revitalisasi dan penambahan jumlah armada untuk memperluas jangkauan, serta meningkatkan pelayanan hingga mampu bersaing dengan maskapai asing di tingkat regional dan dunia.

Upaya Garuda membuahkan hasil. Bahkan, keberhasilannya mendapat pengakuan dari dunia internasional. Simak saja. Dalam *World Airline Award 2015*, yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juni 2015, Garuda Indonesia berhasil memperoleh penghargaan untuk kategori bergengsi *The World Best Cabin Crew Award* dari Sky Trax, sebuah lembaga *review* maskapai penerbangan independen yang berbasis di London, Inggris. Garuda meraih penghargaan ini untuk kedua kalinya, setelah merebut penghargaan yang sama di tahun 2014. Penghargaan ini diberikan berdasarkan survei kepuasan penumpang yang dilakukan oleh Skytrax kepada lebih dari 18 juta penumpang dari 245 maskapai penerbangan di seluruh dunia.

Yang lebih mengagumkan, Skytrax juga menobatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai terbaik ke-8 di dunia. Di daftar ini, peringkat Garuda berada di atas maskapai ternama dunia, seperti Eva Air, Qantas Airways, Lufthansa, Air France, dan lain-lain. Tak hanya itu. Garuda juga dimasukkan sebagai anggota paling baru dari grup eksklusif maskapai penerbangan yang meraih penghargaan bintang 5 dari Skytrax. Layanan penerbangan Garuda kini dinilai setara dengan maskapai besar dunia, seperti Qatar Airways, Cathay Pacific, Singapore Airlines, All Nippon Airways, Asiana Airlines, dan Hainan Airlines. Penghargaan ini hanya diberikan kepada maskapai yang mampu memberikan kualitas terbaik secara konsisten.

Sejalan dengan upaya menyempurnakan pelayanan kepada konsumen, Garuda Indonesia juga terus menambah jumlah armadanya dengan berbagai pesawat terbang jenis terbaru untuk memenuhi permintaan pasar. Di sela-sela Paris Air Show 2015, Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo menandatangani nota keinginan (*letter of intent*) pembelian 30 unit pesawat Airbus A350 XWB yang cocok untuk penerbangan langsung jarak menengah dan jauh. Pesawat terbang A350 XWB ini hemat konsumsi bahan bakar, memiliki daya jangkau tinggi, dan kabin yang ekstra luas. Dengan penambahan armada A350XWB, maka Garuda Indonesia dapat memposisikan diri sebagai maskapai premium yang memimpin di kelas penerbangan jarak jauh ke luar pasar Asia yang sangat kompetitif.

Peningkatan pelayanan Garuda Indonesia ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Hal tersebut juga sejalan dengan target pemerintah pada sektor pariwisata untuk mencapai 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 mendatang. Dan, yang tak kalah penting, Garuda Indonesia siap menghadapi *ASEAN Open Sky*. •

DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

GARUDA-INDONESIA.COM

M. Arif Wibowo, Direktur Utama Garuda, menerima penghargaan The Best Cabin Crew 2015 dari Edward Plaisted, CEO Skytrax, disaksikan Menteri Negara BUMN, Rini Soemarno, di Paris Air Show, 16 Juni 2015.

CITIZENDAILY.NET

M. Arif Wibowo, Direktur Utama Garuda Indonesia menerima penobatan Garuda Indonesia sebagai World's 5 Star Airline, di Jakarta 27 Januari 2015

ASEAN COMMON TIME ZONE, APAKAH PERLU?

Para pemimpin ASEAN pada pertemuan ke-26 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN bulan April lalu di Kuala Lumpur, Malaysia, kembali membahas isu penyatuan zona waktu di ASEAN, atau yang dikenal dengan ASEAN *Common Time Zone (ACTZ)*. Namun, tidak banyak kemajuan yang berhasil dicapai. Ini menimbulkan pertanyaan ,apakah benar ACTZ ini penting bagi pembentukan masyarakat ASEAN?

ACTZ merupakan mekanisme untuk menyamakan zona waktu 10 negara di ASEAN dari 4 zona waktu (GMT+6.30, GMT+7, GMT+8, dan GMT+9) menjadi satu zona waktu, yaitu GMT+8. Gagasan ini pertama kali diusulkan pada pertemuan KTT Informal pertama ASEAN tahun 1996. Waktu itu, para kepala negara sepakat untuk memulai pembahasan ACTZ dan membentuk kajian terkait dampak dari penerapan ACTZ tersebut.

Setelah hampir 2 dekade berlalu, hasilnya tetap *status quo*. Para kepala negara tetap menyatakan argumen bahwa ACTZ masih dalam proses kajian dan sedang dalam koordinasi internal antara instansi pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan konsensus nasional.

Dasar pemikiran penerapan ACTZ ini lebih kepada motif ekonomi. Penera–pan ACTZ nantinya diharapkan dapat menunjang efisiensi ekonomi khususnya bagi kegiatan bisnis, mengingat penerapan zona waktu yang sama akan mempermudah transaksi finansial dan aktivitas di pasar saham. Oleh sebab itu, ACTZ dipandang memiliki dampak positif bagi proses integrasi ekonomi di kawasan. Namun demikian, penerapan ACTZA ini pengaruhnya tidak terlalu signifikan bagi proses integrasi ASEAN.

Pertama, penyatuan zona waktu bukanlah faktor penentu untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Mengacu pada *World Competitiveness Center (WCC),* faktor-faktor penentu efisiensi bisnis adalah tingkat produktivitas, pasar tenaga kerja, dan manajemen finansial. Sekalipun penyatuan zona waktu ini berpengaruh bagi kegiatan bisnis, dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Pasar saham di negara-negara yang menerapkan satu zona waktu secara nasional relatif berdampak sama dengan pasar saham di negara yang menerapkan lebih dari satu zona waktu.

Contohnya, nilai perdagangan saham di Thailand (negara yang menerapkan satu zona waktu nasional) berkurang dari 67.2% di tahun 2012 menjadi 62.7% di tahun berikutnya. Sementara itu, nilai perdagangan saham Indonesia (dengan tiga zona waktu berbeda) juga mengalami pengurangan dari 16.5% menjadi 10.5% di periode yang sama. Dengan kata lain, ACTZ tidak memiliki korelasi langsung dalam mencapai efisiensi dalam aktivitas bisnis di ASEAN.

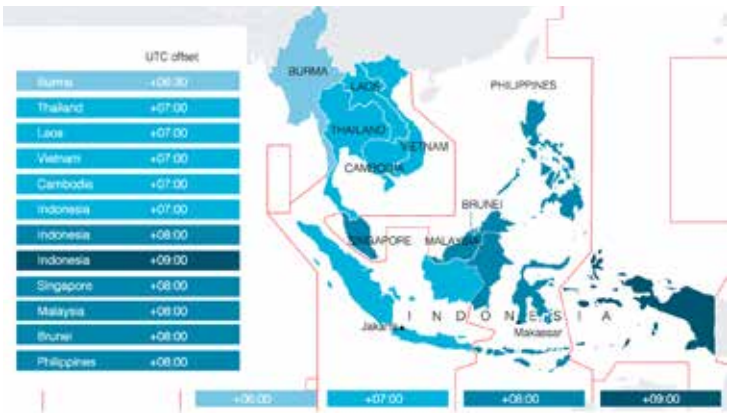

STRAITTIMES.COM

Kedua, jika yang menjadi tujuan adalah integrasi, ACTZ dapat berperan sebagai elemen pendukung integrasi tersebut, namun hal ini tidak serta menjadi elemen utama untuk mewujudkan integrasi yang seutuhnya di ASEAN. Artinya, dengan adanya ACTZ ataupun tidak, integrasi kawasan akan dapat tercapai.

Saat ini, ASEAN telah memiliki sejumlah upaya untuk mewujudkan integrasi kawasan, yakni *Initiatives for ASEAN Integration (IAI)* yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan di antara negara anggota. ASEAN juga sedang melakukan penyusunan rancangan kerja IAI periode ketiga tahun 2016-2020. Lalu, dalam konteks finansial, para Menteri Keuangan ASEAN telah menyusun *Roadmap for Monetary and Financial Integration of ASEAN (RIA-Fin)* yang mencakup 4 area kerjasama, antara lain pengembangan pasar modal, liberalisasi jasa finansial, liberalisasi modal, dan kerjasama mata uang ASEAN. Dibandingkan dengan ACTZ, upaya-upaya integrasi tersebut lebih relevan dan signifikan untuk mempermudah transaksi finansial dan aktivitas pasar saham.

Berbicara mengenai integrasi, Uni Eropa dapat dijadikan contoh bagaimana suatu kawasan tidak memerlukan penyatuan zona waktu untuk mencapai integrasi, utamanya dalam kegiatan keuangan. Di Uni Eropa, terdapat tiga zona waktu berbeda (GMT+0, GMT+1, GMT+2), namun kegiatan bisnis tetap berlangsung secara efisien dan efektif. Apalagi, Uni Eropa saat ini lebih terintegrasi daripada ASEAN.

Pada tataran nasional, Indonesia, khususnya, memandang bahwa ACTZ bukanlah upaya utama untuk mendorong integrasi dan mencapai target ASEAN 2015. Indonesia memiliki pengalaman terkait implementasi penyatuan zona waktu. Tahun 2012, wacana untuk menyatukan 3 (tiga) zona waktu menjadi satu zona waktu nasional dengan GMT+8 pernah diajukan. Karena alasan geografis dan alasan budaya serta keagamaan, para pengambil kebijakan pada waktu itu memutuskan untuk menunda penerapan penyatuan zona waktu nasional. Mengambil pembelajaran dari masa lalu, tidak dipungkiri lagi bahwa Indonesia sulit untuk menyetujui penerapan ACTZ.

Setidaknya untuk saat ini, ACTZ kurang signifikan kontribusinya bagi integrasi ASEAN. Sebab itu, para kepala negara ASEAN sebaiknya mempertimbangkan kembali apakah ACTZ tersebut penting bagi seluruh anggota ASEAN. Jika tidak, maka penerapan ACTZ akan kontra produktif dengan upaya untuk mewujudkan *community-building* di ASEAN. •

DIT. KERJA SAMA EKONOMI ASEAN

KATA MEREKA TENTANG MEA

Salah satu syarat penting agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang dari pembentukkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan MEA ini. Tidak mungkin Indonesia bisa meningkatkan daya saing, hingga unggul di pasar regional ASEAN, tanpa peran serta aktif dari masyarakat.

Untuk bisa ikut berpartisipasi, tentu masyarakat harus tahu dan mengenal lebih dulu apakah itu MEA, dan apa manfaatnya bagi mereka. Karenanya, kegiatan sosialisasi tentang Masyarakat ASEAN dan MEA pun diselenggarakan di berbagai daerah, oleh berbagai pihak, terutama oleh Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI.

Untuk mengetahui keberhasilan program sosialisasi itu, maka Majalah Masyarakat ASEAN berusaha bertanya langsung kepada masyarakat, tentang MEA. Melalui rubrik ini, setidaknya bisa didapatkan gambaran sekilas tentang seberapa jauh pengetahuan masyarakat tentang MEA, serta pendapat mereka tentang integrasi ekonomi negara-negara ASEAN ini.

Berikut ini kami sajikan beberapa komentar berbagai kalangan ma–syarakat tentang MEA.

HOTMA DORHA
INDONESIA MAMPU BERSAING

Sangat bagus jika pasar bebas ASEAN itu terwujud, itu sangat bagus, karena orang akan menjadi lebih sejahtera. “Tetapi, di sisi lain persaingannya juga menjadi semakin ketat.,” ungkap Hotma Dorha, staf *Human Resources Dept (HRD)* sebuah kantor yang berlokasi di bilangan Kuningan.

Ia melanjutkan, Indonesia semestinya memajukan dan mengembangkan sektor agrikultur, karena populasi Indonesia terus meningkat. Dalam bidang ekonomi, mungkin ada inflasi, tetapi ekonomi Indonesia cukup stabil dan kedepannya akan semakin bagus karena sekarang juga sudah mulai bagus. “Saya sangat yakin Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara lainnya,” tuturnya optimis. •

MARIA MAGDALENA
JANGAN SAMPAI KETINGGALAN

Pasar Bebas ASEAN, mau tidak mau harus dijalani karena itu merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN. ”Indonesia sebagai bagian dari negara yang ada di kawasan ASEAN, mau tidak mau akan dihadapkan dengan era pasar bebas ASEAN,” ujar Maria Magdalena, ibu rumah tangga yang sering bepergian ke luar negeri, terutama ke negara-negara ASEAN.

Menurutnya, sebelum pasar bebas dibuka, hendaknya pemerintah sudah menyiapkan jauh-jauh waktu, jangan sampai ketinggalan dengan negara ASEAN lainnya. Ia mencontohnkan Thailand yang ia nilai sudah lebih siap. Berdasarkan pengalamannya berkunjung ke Thailand, Maria melihat, para pedagang di sana sudah lebih siap menyambut era Masyarakat Ekonomi ASEAN. ”Banyak pedagang di Thailand yang sudah mengerti dan mempergunakan bahasa Indonesia jika pembelinya orang Indonesia,” tutur Maria.

Harapannya, Indonesia bisa bersaing di pasar bebas nanti. Karena, tambah Maria, Indonesia banyak memiliki hasil bumi yang bisa dijadikan komoditi ekspor, jika dikelola dengan baik. •

GIDEON
TANTANGAN BERAT SDM

Menjelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), setiap negara di kawasan Asia Tenggara tentunya telah bersiap dan berbenah diri untuk dapat memenangkan persaingan, tak terkecuali Indonesia. Begitulah tanggapan Gideon, pria yang bekerja di bidang Pharmacist Incharge sepertinya sudah memahami Pasar Bebas ASEAN.

Dengan jumlah penduduk terbesar serta wilayah terluas di Asia Tenggara ini, tentunya Indonesia menjadi salah satu pangsa pasar yang sangat menarik bagi negara lain. Untuk itu, pada tahun 2015 yang akan menjadi pembuka pasar bebas ASEAN ini, masyarakat Indonesia diharapkan sudah mampu bersaing dengan segala kemampuannya, baik *hard skil*l maupun *soft skill,*

Tantangan berat pemerintah khususnya terdapat pada sektor tenaga kerja, peluang kerja yang ada di Indonesia malah diisi oleh tenaga kerja dari negara ASEAN lain saat MEA berlangsung. Tenaga kerja Indonesia bebas ke negara kawasan MEA, dan sebaliknya tenaga kerja dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia dengan kualitas sumber daya yang tinggi.•

SYAHRIL HARAHAP
EKSPANSI TENAGA KERJA

Hadirnya MEA akan berpengaruh tidak hanya pada sektor perdagangan bebas untuk berbagai produk barang, tetapi juga akan berpengaruh terhadap sektor tenaga kerja. Dengan MEA, berbagai negara di ASEAN akan dengan bebas bersaing untuk mengisi sektor tenaga kerja di seluruh negara ASEAN. Bagi negara yang memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang tinggi, MEA ini akan menjadi peluang untuk melakukan ekspansi tenaga kerja ke negara ASEAN lainnya.

Menurut Syahril Harahap, *Project Manager* sebuah perusahaan di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia dapat mengelola potensi perdagangan bebas dengan baik jika pemerintah mampu menyajikan kepastian hukum, birokrasi yang sederhana, dan menciptakan sumber daya manusia yang memadai. Sayangnya, tenaga kerja di Indonesia masih dinomor duakan dan lebih mempercayai tenaga kerja asing ketimbang lokal. Tak sedikit tenaga kerja asing yang sudah fasih berbahasa Indonesia. Sebaiknya pemerintah memperkerjakan tenaga lokal dengan kualitas yang sama dalam bersaing di pasar bebas ASEAN. •

APUL SINURAT
BANYAK YANG HARUS DIBENAHI

Pria yang bekerja di *Corporate legal consultant* di Jakarta Selatan ini masih meragukan kemampuan Indonesia dalam bersaing di era MEA. Hingga saat ini, menurutnya daya saing produk Indonesia, baik dari sisi kualitas maupun harga masih kalah dari beberapa negara ASEAN lainnya.

Beragam kebijakan ekonomi pemerintah dalam bentuk pencabutan subsidi dan liberalisasi perdagangan, semakin melemahkan kekuatan produk Indonesia dalam persaingan regional. Dengan modal yang jauh lebih besar, dan penguasaan teknologi canggih, plus keberpihakan negara, maka negara besar dapat memproduksi barang jauh lebih banyak, dengan harga jual lebih rendah. Sementara masyarakat umumnya memilih membeli produk yang lebih murah meski impor. Lambat-laun pengusaha lokal pun akan banyak yang gulung tikar karena kalah bersaing.

Apul berharap pemerintah, dan pihak-pihak terkait bisa memberikan kemudahan dalam perijinan usaha, motivasi, produktivitas, dan kualitas tenaga kerja. Balai-balai latihan kerja juga tentunya harus disiapkan untuk mempersiapkan diri menyambut MEA. •

AHMAD TAUFIK
BANYAK PELUANG

Masyarakat Ekonomi ASEAN berarti semua jenis barang dan jasa akan diperdagangkan secara bebas di ASEAN. Demikian menurut Ahmad Taufik yang bekerja di sebuah bank di kawasan Kuningan, Jakarta MEA juga merupakan momen penting bagi Indonesia, karena berpeluang memperluas pasar bagi produk-produk industri nasional ke pasar ASEAN.

Menurut pria yang pernah mengikuti seminar tentang MEA ini, banyak sekali sektor di Indonesia yang bisa dimanfaatkan untuk unggul di era MEA. Misalnya, lebih dari setengah wilayah indonesia adalah perairan, sehingga sektor perikanan bisa dimanfaatkan. Kemudian, sumber daya alam Indonesia juga melimpah. Seandainya itu dimanfaatkan dengan baik, bisa membantu ekonomi Indonesia menjadi semakin maju. Jadi untuk menghadapi MEA, Indonesia harus melakukan pembangunan dalam segala sektor. "Sumber daya manusia juga harus diperbaiki, supaya kita bisa mengolah hasil alam yang kita punya," ujar Ahmad..●

ROCHMAD
OKE-OKE SAJA

Pria ini pernah melihat iklan tentang MEA, tapi ia mengaku belum mengerti apa itu MEA. "Namun bagi saya, jika MEA baik untuk kita semua, ya oke-oke saja," ujarnya sambil tersenyum lebar.

Pedagang sayur di pasar Tangerang ini mengemukakan tidak menjadi soal tentang adanya pasar bebas di Indonesia. Yang paling penting baginya, dagangannya laku di pasar.

"Saya sih terserah pemerintah aja tentang adanya MEA. Yang penting, usaha dagang saya lancar tidak ada hamba–tan. Harapan saya kepada pemerintah, supaya pemerintah dapat mempermudah segalanya dan memperhatikan pedagang kecil," katanya. ●

WIDA LISYANI
KURANG SOSIALISASI

Wida, seorang pelajar SMA di bilangan BSD, Tangerang Selatan, belum paham betul tentang adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menurutnya, di sekolah pun kurang pelajaran tentang ASEAN. "Selama ini pemerintah soaialisasinya kurang gencar, masih banyak masyarakat belum mengetahui MEA," ungkap Wida.

Saya tahu ASEAN kerja sama di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya tetapi kalau MEA belum paham. Jika MEA itu perdagangan bebas saya berharap jangan sampai pedagang kita tersaingi oleh pedagang asing. Sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti MEA. ●

SRIYATI
PERHATIKAN PEDAGANG KECIL

Ibu dari dua anak yang berdagang ayam potong di pasar Tangerang ini mengaku belum pernah mendengar tentang MEA. "Wah.. Gak tahu tuh... Mau ada pasar bebas ASEAN di tahun depan, saya hanya dagang setiap hari disini, tidak ada orang dari pemerintahan yang datang memberikan penjelasan MEA," jawab Sriyati ketika ditanya tentang Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan mulai diberlakukan akhir 2015.

Harapannya terkait pemberlakuan MEA, pemerintah mau memperhatikan pedagang kecil yang ada di pasar. "Yang penting bagi saya, dagangan saya bisa terjual setiap harinya," kata Sriyati. ●

SETDITJEN. KERJA SAMA ASEAN

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN,
Kementerian Luar Negeri RI, mengucapkan

Selamat Hari Raya
Idul Fitri 1436 H

Mohon Maaf Lahir dan Batin

CARAKA BHUWANA

asean